

**PERAN *ANTI SLAVERY* DALAM USAHA MENGHAPUSKAN  
PERBUDAKAN DI MAURITANIA TAHUN 2013 – 2018**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Hubungan  
Internasional dengan Peminatan *International Security and Peace*



Disusun Oleh :

**Alya Zhafira Zulkarnain**

**165120401111029**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di Mauritania  
Tahun 2013 – 2018**

**SKRIPSI**

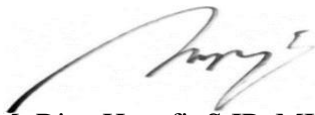
Disusun oleh :

**Alya Zhafira Zulkarnain**

**165120401111029**

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian sarjana di tanggal **31 Maret 2020**

**Ketua Majelis Penguji**



M. Riza Hanafi, S.IP.,MIA

NIK. 2011028002071001

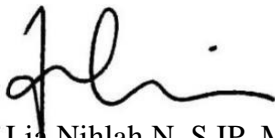
**Sekretaris Majelis Penguji**



Irza Khurun'in, S.IP.,MA

NIK. 2017109105132001

**Pembimbing Utama**



Lia Nihlah N, S.IP.,M.Si

NIK. 2009068305212001

**Pembimbing Pendamping**



Arief Setiawan, S.IP.,MPS

NIP. 198403182009011008

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Brawijaya**



Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE.,M.Si.,Ak

NIP. 1969081419940210001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di  
Mauritania Tahun 2013 – 2018**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**Alya Zhafira Zulkarnain**

**165120401111029**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

**Pembimbing Utama**



Lia Nihlah N, S.IP.,M.Si

NIK. 2009068305212001

**Pembimbing Pendamping**



Arief Setiawan, S.IP.,MPS

NIP. 198403182009011008

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Arivanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alya Zhafira Zulkarnain

NIM. : 165120401111029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di Mauritania Tahun 2013 – 2018**" adalah benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya. Dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 6 Maret 2020



Alya Zhafira Zulkarnain

## **Abstrak**

### **Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di Mauritania Tahun 2013 – 2018**

Oleh : Alya Zhafira Zulkarnain

Perbudakan, bukan merupakan suatu hal yang baru saja terjadi. Di tengah-tengah dunia modern, saat ini di Mauritania masih dapat ditemui bentuk praktik perbudakan dengan sistem tradisional yaitu perbudakan berbasis keturunan. Dalam praktiknya, perbudakan di Mauritania seringkali melibatkan kekerasan baik fisik maupun seksual. Kurangnya jaminan terkait pendidikan, advokasi bantuan hukum dan ekonomi dari pemerintah menjadi faktor penghambat upaya penghapusan praktik perbudakan. *Anti Slavery* yang merupakan organisasi internasional kemudian muncul untuk mengusahakan penghapusan praktik perbudakan di Mauritania dengan cara mengambil peran dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, hukum hingga ekonomi. Mengingat lemahnya upaya pemerintah, kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran yang telah dilakukan oleh *Anti Slavery* untuk dapat mengusahakan penghapusan praktik perbudakan di Mauritania pada tahun 2013 hingga 2018 melalui konsep peran organisasi non pemerintah milik Lewis dan Kanji.

**Kata kunci** : Perbudakan, Mauritania, Organisasi Non Pemerintah.

## **Abstract**

### **Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di Mauritania Tahun 2013 – 2018**

Oleh : Alya Zhafira Zulkarnain

*Slavery, is not a new thing that just happened. In the middle of modern world, right now in Mauritania can still be found forms of slavery practice with traditional system it was namely descent based slavery. In the practice, slavery in Mauritania often involving physical and sexual violence. The lack of guarantees related to education, law advocating and economic by the government is a limiting factor for eliminating the slavery in Mauritania. Anti Slavery as an international non government organization then appears to help the eliminate of the slavery in Mauritania by taking roles in various fields including education, law and economy. Remembering the weakness of the government, then this research was conducted with the aim to describe the role that has been done by Anti Slavery to seek the removal of slavery practice in Mauritania from 2013 until 2018 with the concept of the role of non governmental organizations belonging to Lewis and Kanji.*

**Keywords** : *Slavery, Mauritania, Non Government Organization.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
2.1 Studi Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Konseptual .....	12
2.2.1 Peran Organisasi Internasional (David Lewis dan Nazneen Kanji) .....	12
2.3 Kontekstualisasi .....	16
2.4 Alur Pemikiran.....	18
<b>BAB III.....</b>	<b>19</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	19
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.4 Teknik Analisa Data.....	20
3.5 Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB IV .....</b>	<b>24</b>
4.1 Perbudakan di Mauritania.....	24

4.2 Kebijakan Pemerintah Mauritania.....	30
4.3 <i>Anti Slavery</i> .....	39
4.3.1 Program.....	42
4.3.2 Pendanaan .....	44
<b>BAB V .....</b>	<b>48</b>
5.1 Peran <i>Anti Slavery</i> sebagai <i>Implementers</i> .....	48
5.2 Peran <i>Anti Slavery</i> sebagai <i>Catalyst</i> .....	51
5.3 Peran <i>Anti Slavery</i> sebagai <i>Partners</i> .....	54
<b>BAB VI .....</b>	<b>60</b>
6.1 Kesimpulan .....	60
6.2 Saran.....	63
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>64</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbudakan atau *slavery* bukan merupakan suatu fenomena yang baru saja terjadi, isu ini telah hadir semenjak ratusan tahun yang lalu dan terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Perbudakan berdasarkan *Slavery Convention* 1926 diartikan sebagai sebuah status atau kondisi seseorang yang terikat dengan kekuatan sebuah kepemilikan.<sup>1</sup> Saat ini perbudakan merupakan hal yang dilarang dan ilegal di setiap negara.<sup>2</sup>

Perbudakan telah di upayakan untuk di hapuskan semenjak abad ke 19<sup>3</sup>, namun pada kenyataannya perbudakan masih terus terjadi dan mengubah bentuknya. Berbagai *form* perbudakan saat ini adalah budak paksa, orang-orang yang terikat dengan hutang dan di paksa untuk menjadi budak, perdagangan manusia, perbudakan berbasis keturunan, perbudakan di bawah umur atau anak-anak hingga pernikahan paksa.<sup>4</sup>

Kevin Bales dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat dua jenis *slavery*, yaitu *old slavery* dan *new slavery*.<sup>5</sup> Ia menjelaskan bahwa *old slavery* merupakan jenis perbudakan yang berawal dari adanya perbedaan etnis. Selain itu *old slavery*

---

<sup>1</sup> United Nations. *Slavery Convention* 1995.

<sup>2</sup> Shelley K White and Jonathan M White. *Sociologist in Action on Inequalities : Race, Class, Gender and Sexuality*. (New York: Sage, 2014), 43.

<sup>3</sup> Anti Slavery, "What is Modern Slavery?", <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/> (accessed November 10, 2019).

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kevin Bales. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. (Berkley: University of California, 2012), 15.

juga mementingkan legalitas kepemilikan, maka dari itu tuan dari budak dalam sistem ini akan mengeluarkan biaya tinggi dengan hasil profit yang tidak terlalu tinggi. Kevin Bales juga menambahkan bahwa di dalam sistem *old slavery*, hubungan antara tuan dan budaknya akan berlangsung lama atau berjangka panjang.<sup>6</sup>

Sedangkan *new slavery* menurut Kevin Bales merupakan jenis perbudakan yang tidak berlandaskan etnis atau perbedaan rasial lainnya, namun sangat berfokus pada keuntungan besar dengan pembiayaan rendah. *New slavery* juga mengutamakan kelemahan seorang budak dengan cara menjebak atau menipunya dalam berbagai hal. Selain itu *new slavery* tidak berbicara tentang legalitas kepemilikan, namun lebih berfokus kepada bagaimana seorang tuan dapat mengontrol penuh atas kepemilikan budaknya dengan kekerasan dan menanamkan ketakutan yang besar. Perbudakan jenis *new slavery* biasanya dianggap sebagai *disposable tools*, karena biasanya budak pada jenis ini hanya akan di jadikan budak ketika mereka masih di anggap berguna yang akhirnya menyebabkan hubungan antara tuan dan budak berjangka pendek.<sup>7</sup>

Afrika merupakan salah satu wilayah yang hingga saat ini menjadi bukti bahwa, masih adanya perbudakan yang berlangsung baik dengan sistem *old slavery* maupun *new slavery*. Pada tahun 2016, diperkirakan 9,2 juta pria, wanita, dan anak-anak hidup dalam *slavery* di Afrika. Terdapat beberapa bentuk *new slavery* yang terjadi di wilayah Afrika, yang pertama yaitu pernikahan paksa atau *forced*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, 4.

*marriage* dengan jumlah 4,8% korban per 1.000 orang di wilayah ini, serta terdapat kerja paksa atau *forced labour* dengan jumlah 2,8% korban per 1.000 orang. Selain itu, diperkirakan 400.000 orang di wilayah Afrika adalah merupakan korban eksploitasi seksual paksa dan eksploitasi seksual komersial.<sup>8</sup> Terlepas dari *new slavery* yang terjadi di Afrika, Salah satu negara di Afrika yang saat ini masih membawa sistem *old slavery* ke dunia modern adalah Mauritania.<sup>9</sup> Mauritania terletak pada bagian barat benua Afrika dan berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Sahara Barat di utara dan barat laut, Aljazair di timur laut, Mali di timur dan tenggara, dan Senegal di barat daya.<sup>10</sup>

Pada tahun 2018, populasi di Mauritania mencapai jumlah 4.403.319.<sup>11</sup> Berdasarkan etnis, populasi di Mauritania terbagi menjadi tiga. Sejumlah 40% dari populasi di Mauritania terdapat etnis *Black Moor* atau *Haratines* yang berbicara menggunakan bahasa Arab, etnis ini dikenal sebagai budak atau mantan budak dari entis lainnya yaitu *White Moor*. Selanjutnya terdapat 30% dari jumlah populasi yaitu *White Moor* yang merupakan keturunan dari *Arab-Berber* atau *Beydane* yang juga berbicara menggunakan Bahasa Arab. Terakhir terdapat 30% dari jumlah populasi yaitu etnis *sub-Sahara Mauritians*, etnis ini tidak berbicara dalam Bahasa Arab karena sebagian besar dari etnis ini merupakan penduduk yang berasal

---

<sup>8</sup> Global Slavery Index, “Regional Analysis : Africa, 2018”. <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/africa/> (accessed September 22, 2019).

<sup>9</sup> Kevin Bales. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. (Berkley: University of California, 2012), 11.

<sup>10</sup> BBC News, “Mauritania Country Profile, 2018”, <https://www.bbc.com/news/world-africa-13881985> (accessed September 22, 2019).

<sup>11</sup> The World Bank, 2019. “Mauritania : Total Population”, <https://data.worldbank.org/country/mauritania> (accessed September, 22, 2019).

dari Lembah Sungai Senegal, Halpulaar, Fulani, Soninke, Wolof, dan kelompok etnis Bambara.<sup>12</sup>

Berdasarkan data *Global Slavery Index*, pada tahun 2013 Mauritania di tetapkan sebagai negara yang memiliki proporsi orang terbanyak dalam perbudakan di dunia. Sejumlah 20% dari populasinya diperbudak, yang berarti 140.000 jiwa terjebak dalam praktik perbudakan pada tahun 2013.<sup>13</sup> Masih berdasarkan *Global Slavery Index*, pada tahun 2014 perbudakan di Mauritania terus meningkat. Terbukti pada tahun 2014 jumlah populasi yang terjebak dalam perbudakan adalah sejumlah 155.600 dari 3.889.880 jiwa.<sup>14</sup> Pada tahun 2015 hingga 2016, tercatat sejumlah 43.000 jiwa dari jumlah populasi 4.068.000 jiwa yang masih terjebak dalam perbudakan.<sup>15</sup> Semenjak memasuki tahun 2017 hingga 2018, terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2016 hingga ke 2018 yaitu sejumlah 90.000 jiwa terjebak dalam perbudakan di Mauritania dari jumlah populasi 4.182.000 jiwa.<sup>16</sup> Berdasarkan *Global Slavery Index* pada akhir tahun 2018 hingga 2019, Mauritania berada di peringkat keenam sebagai negara dengan prevalensi populasi hidup

---

<sup>12</sup> Central Intelligence Agency, “*The World Factbook : Mauritanian Ethnic Group*”, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html> (accessed 2019, September 22).

<sup>13</sup> Global Slavery Index, 2013, *The Global Slavery Index Highlights 2013 : Mauritania*, [http://www.freedom.firm.in/wp-content/uploads/2014/04/GlobalSlaveryIndex\\_2013\\_Download\\_WEB1.pdf](http://www.freedom.firm.in/wp-content/uploads/2014/04/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf) (accessed 2019, Oktober24)..

<sup>14</sup> Global Slavery Index, 2014, *The Global Slavery Index Highlights 2014 : Mauritania*, [https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery\\_2014\\_LR-FINAL.pdf](https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf) (accessed 2019, Oktober 24).

<sup>15</sup> Global Slavery Index, 2016, *The Global Slavery Index Highlights 2016 : Mauritania*, <https://www.traffickingmatters.com/wp-content/uploads/legal-resources/walk-free-global-slavery/2016-Global-Slavery-Index-Walk-Free.pdf> (accessed 2019, Oktober 24).

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 69.

terjebak dalam perbudakan. Hingga tahun 2018 populasi Mauritania mencapai 4.182.341 dan sejumlah 21.43% dari populasinya terjebak dalam perbudakan.<sup>17</sup>

Perbudakan berbasis keturunan atau yang biasa di sebut dengan *descent based slavery*, merupakan salah satu bentuk perbudakan yang hingga kini masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Mauritania. Dalam sistem perbudakannya, status budak di turunkan melalui garis keturunan ibu ke anak. Para budak ini di jadikan sebagai properti oleh tuan-tuan mereka, hidup di bawah arahan serta tidak menerima pembayaran. Anak-anak dari budak juga dianggap sebagai milik tuan yang bisa di sewakan, di pinjamkan, di berikan sebagai hadiah dalam pernikahan atau diwarisi kepada keluarga tuannya.<sup>18</sup> Sistem perbudakan yang selama ini telah mengakar di Mauritania, di anggap sebagai sesuatu hal yang biasa oleh masyarakatnya. Sehingga hal tersebut berhasil melanggengkan praktik perbudakan yang terjadi dan membuat masih dapat di temukannya budak-budak yang berkerja di jalanan.<sup>19</sup>

Berlandaskan jumlah jiwa yang terjebak dalam perbudakan serta kompleksitas permasalahan, akhirnya memunculkan urgensi terhadap penyelesaian kasus perbudakan di Mauritania. Salah satu organisasi internasional yang memiliki peran yang cukup penting dalam usaha menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania adalah *Anti Slavery*. Organisasi ini adalah salah satu aktor internasional

---

<sup>17</sup> Global Slavery Index, 2018, “Country Data : Mauritania”, <https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/mauritania/> (accessed 2019, Desember 5).

<sup>18</sup> Mathewson, Sarah and Rebecca Marlin. *Enforcing Mauritania’s Anti-Slavery Legislation*. (London: British Library, 2015), 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*

yang berhasil melaporkan praktik perbudakan yang terjadi di Mauritania kepada *UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery* pada tahun 2007.<sup>20</sup> Hal tersebut kemudian berhasil mendorong terjadinya kriminalisasi perbudakan di Mauritania oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang *Anti Slavery* tahun 2007.<sup>21</sup>

*Anti Slavery* merupakan organisasi internasional, yang kemudian dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari *International Non Governmental Organization* (INGO). INGO di artikan sebagai organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan atau beroperasi di luar batas negara serta memiliki misi internasional.<sup>22</sup> Organisasi ini didirikan pada tahun 1839 oleh Thomas Clarkson, Thomas Fowell Buxton beserta para abolisionis lainnya di Inggris untuk melawan praktik perbudakan di dunia.<sup>23</sup>

Walaupun berdiri secara independen, organisasi ini juga memiliki struktur keorganisasian. Struktur organisasi *Anti Slavery* terdiri dari empat bagian, yaitu direktur, tim program dan advokasi, tim komunikasi dan penggalangan dana, serta tim administrasi dan keuangan.<sup>24</sup> Dalam upayanya untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan dan praktik perbudakan di seluruh dunia, organisasi berusaha

---

20 Anti Slavery, 2017, *Help Us Finished What We Started*, <https://www.antislavery.org/abolition/> (accessed 2019, December 2019).

21 “*Mauritania Slavery Act 2007*”, [https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/10/Mauritania-2007-anti-slavery-law\\_English.docx](https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/10/Mauritania-2007-anti-slavery-law_English.docx) (accessed 2020, January 11).

22 Robert K Christensen. *International Nongovernmental Organizations: Globalization, Policy Learning, and the Nation-State*. (London: Routledge, 2006), 284.

23 Anti Slavery, “*Our History*”, <https://www.antislavery.org/about-us/history/> (accessed 2020, February 20).

24 Anti Slavery, “*Staff and Trustees*”, <https://www.antislavery.org/about-us/staff/> (accessed 2020, February 20).

melalui cara menyentuh serta menangani akar penyebab permasalahan perbudakan agar dapat mencapai perubahan yang berkelanjutan.<sup>25</sup>

*Anti Slavery* mulai aktif berkerja secara langsung pada tahun 2012 dan 2013 di Mauritania, salah satunya yaitu dengan menyediakan layanan serta fasilitas bagi korban perbudakan seperti uang, shelter sebagai tempat tinggal, akses pendidikan dasar serta menyediakan pinjaman mikro.<sup>26</sup> Kemudian dengan aktif dalam melangsungkan kegiatan kampanye “*From Slavery Survivors to Entrepreneurs*”. Kampanye dilakukan melalui pemberian training dan pelatihan terkait *self empowering*, bisnis dan juga dunia usaha dengan tujuan agar wanita yang terjebak dalam perbudakan berani mengambil tindakan untuk keluar dari praktik tersebut.<sup>27</sup> Terhitung semenjak tahun 2013 hingga awal tahun 2019, terdapat 180 wanita korban perbudakan di Mauritania yang telah mendapatkan pelatihan serta pinjaman mikro dari *Anti Slavery* sehingga akhirnya berhasil membuka koperasi lokal, toko pakaian serta makanan.<sup>28</sup>

Dalam upayanya untuk menyentuh aspek akar rumput, *Anti Slavery* menjalin kerjasama sebagai *partner* dengan organisasi pembebasan budak lokal di Mauritania seperti *SOS-Esclaves* dan *Minority Rights Group* melalui pengadaan

---

25 *Anti Slavery*, “*About Us*”, <https://www.antislavery.org/about-us/> (accessed 2020, February 20).

26 *Anti Slavery*, “*A Difficult Path to Freedom*”, <https://www.antislavery.org/difficult-path-to-freedom/> (accessed November 15, 2019).

27 *Anti Slavery*, “*Let’s Give Woman Tools to Live Their Lives in Freedom*”, <https://www.antislavery.org/lets-give-women-tools-to-live-their-lives-in-freedom/> (accessed November 15, 2019).

28 *Anti Slavery*, “*The Difference You Make in 2018*”, <https://www.antislavery.org/impact/difference-you-made-2018/> (accessed November 29, 2019).

28 *Anti Slavery*, “*What We Do : Mauritania*”, <https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/> (accessed November 15, 2019).

advokasi nasional terkait bantuan hukum bagi para korban perbudakan.<sup>29</sup> Semenjak tahun 2013 hingga akhir 2018, *Anti Slavery* bersama mitranya *Sos-Esclaves* dan *Minority Rights Group* berhasil menyelesaikan 2 prosekusi kasus dari 40 kasus yang telah diajukan ke pengadilan di Mauritania.<sup>30</sup>

Adanya penyediaan fasilitas program-program, kampanye serta advokasi terkait bantuan bagi korban perbudakan yang di bawa oleh *Anti Slavery* ke Mauritania semenjak tahun 2012 dan 2013 menjadikan perannya penting. Selain itu mengingat pada tahun 2013 Mauritania di tetapkan sebagai negara dengan proporsi orang terbanyak yang terjebak dalam perbudakan, maka penulis memilih tahun 2013 hingga 2018 untuk melihat peran *anti slavery* dalam usaha menghapuskan perbudakan di mauritania tahun 2013 – 2018.

---

29 Anti Slavery, “*What We Do : Mauritania*”, <https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/> (accessed November 15, 2019).

30 Anti Slavery, “*Mauritania : Descent Based Slavery*”, <https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/> (accessed November 29, 2019).



## **1.2 Rumusan Masalah**

Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang yang penulis paparkan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai **Bagaimana Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di Mauritania Tahun 2013 – 2018**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang di lakukan ini adalah untuk mendeskripsikan Peran *Anti Slavery* Dalam Usaha Menghapuskan Perbudakan Di Mauritania Tahun 2013 – 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan untuk dapat membangun pengetahuan serta pemikiran dalam studi ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam bidang Organisasi Internasional dan Perbudakan.
2. Sebagai informasi bagi peneliti lainnya yang juga memiliki fokus isu yang sama.
3. Sebagai pengembang kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Studi Terdahulu

Pada bagian ini, terdapat penjelasan mengenai studi terdahulu yang penulis gunakan untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah yang telah di gagas. Penulis melakukan kajian terhadap studi terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan isu yang akan di bahas.

Studi terdahulu yang penulis gunakan guna membantu penelitian ini adalah hasil penelitian milik Kevin Bales yang di tuangkannya dalam buku yang berjudul *Disposable People*. Di dalam bukunya, Kevin Bales menjelaskan tentang adanya perbedaan antara sistem perbudakan yang terjadi semenjak dulu hingga saat ini. Kevin Bales membedakan bentuk *slavery* menjadi dua, yaitu *old slavery* dan *new slavery*.<sup>31</sup> Dimana dalam bukunya, Kevin Bales juga menjelaskan tentang adanya perdebatan tentang “posisi” sistem perbudakan di Mauritania.<sup>32</sup>

Melalui hasil penelitiannya, Kevin Bales juga menceritakan kilasan sejarah terkait perbudakan di Mauritania.<sup>33</sup> Selain itu juga terdapat ringkasan hasil wawancaranya dengan beberapa budak yang berhasil ia temui.<sup>34</sup> Hal tersebut memberikan gambaran kepada penulis terkait bagaimana pemahaman, pengalaman,

---

<sup>31</sup>Kevin Bales. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. (Berkley: University of California, 2012), 15.

<sup>32</sup>*Ibid*, 17-19.

<sup>33</sup>*Ibid*, 84.

<sup>34</sup>*Ibid*, 83.

praktik serta permasalahan utama yang menyebabkan perbudakan di Mauritania masih bergulir.

Adanya pembahasan isu yaitu perbudakan di Mauritania dalam buku milik Kevin Bales, menjadi persamaan dengan isu penelitian penulis. Serta banyaknya informasi yang penulis dapatkan melalui buku milik Kevin Bales, dapat penulis jadikan referensi dalam memahami sebuah fenomena perbudakan di Mauritania. Namun terlepas dari persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha melihat bagaimana upaya sebuah organisasi internasional dalam usaha menghapuskan perbudakan di Mauritania, sedangkan Kevin Bales hanya menjelaskan permasalahan perbudakan dan segala bentuknya.

Studi selanjutnya yaitu penulis menggunakan artikel milik Ann McDougall, dengan judul *Living The Legacy of Slavery*. Dalam tulisannya, artikel ini memberikan gambaran tentang perbudakan di Mauritania dan bentuk permasalahannya. Selain itu, artikel ini juga berbicara bahwa perbudakan di Mauritania adalah merupakan sebuah masalah sosial dan politik dengan resonansi dalam istilah historis maupun kontemporer.<sup>35</sup> Melalui artikelnya yang berjudul *Hamody of Atar*, penulis berupaya menggambarkan sejarah kasus mantan keluarga budak sebagai cara untuk memahami kerumitan praktik perbudakan yang terjadi berdasarkan perspektif pengalaman pribadi dan juga posisi pemerintah Mauritania.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Anne E McDougall. *Living The Legacy of Slavery*. (Canada: University of Alberta, 2005), 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, 3-4.

Artikel *Living The Legacy of Slavery* memberikan gambaran terkait ciri khas bentuk perbudakan di Mauritania, yaitu berbentuk *descent based slavery*. Maka dari itu, artikel ini memuat banyak sejarah pembentukan sistem perbudakan di Mauritania semenjak masa kolonial yang akhirnya membentuk sebuah identitas budak di Mauritania.<sup>37</sup> Melalui tulisannya, artikel ini juga memuat gambaran tentang bagaimana organisasi-organisasi lokal yang bergerak dalam bidang pembebasan budak berjuang mencapai agendanya dan melawan sistem perbudakan yang telah mengakar di Mauritania.<sup>38</sup> Artikel yang ditulis oleh Ann McDougall, memberikan gambaran kepada penulis terkait sejarah serta penjelasan mengenai sulitnya menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Peran Organisasi Internasional (David Lewis dan Nazneen Kanji)**

Dalam dunia politik internasional, organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik internasional karena di yakini memiliki kekuatan untuk melakukan mediasi, menyelesaikan sengketa, menjaga perdamaian hingga menerapkan sanksi dan lainnya.<sup>39</sup> Organisasi internasional sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah lembaga atau struktur yang memiliki serangkaian aturan dan anggota yang utuh.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 4-5.

<sup>38</sup> *Ibid*, 6-8.

<sup>39</sup> Abbott K and Snidal, D, 1998, “*Why States Act through Formal International Organizations*”, <https://sta.uwi.edu/iir/normangirvanlibrary/sites/default/files/normangirvanlibrary/documents/Why%20States%20Act%20Through%20Formal%20International%20Organisations.pdf> (accessed 2020, January 15).

<sup>40</sup> Michael Hass and James N. Rossenau. *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory*. (New York: The Free Press, 1969), 131.

Menurut Umar S. Bakry, organisasi internasional dapat di bedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya. Pertama yaitu *Intergovernment Organizations* (IGO), merupakan sebuah organisasi yang di bentuk dan di anggotai oleh dua atau lebih negara-negara yang berdaulat secara sukarela. Walaupun keanggotaannya cenderung bersifat sukarela, namun organisasi ini tetap memiliki staff dan juga waktu temu secara regular. Kemudian terdapat *Non Government Organizations* (NGO), yang secara singkat di artikan sebagai organisasi non pemerintah. NGO merupakan sebuah organisasi yang memiliki struktur dan berkerja secara internasional, akan tetapi tidak memiliki hubungan secara serius atau terikat dengan pemerintah suatu negara.<sup>41</sup> Selain itu, NGO juga sering di artikan sebagai organisasi yang memiliki fokus kegiatan dalam peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat atau individu yang membutuhkan.<sup>42</sup>

Melalui bukunya yang berjudul *The Management of Non-Governmental Organizations* (NGO), Lewis dan Kanji menjelaskan bahwa saat ini NGO secara luas telah menjadi aktif menjalankan berbagai peran yang lebih khusus seperti tanggap darurat, pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, pekerjaan dalam bidang hak asasi manusia, pelestarian budaya, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan, penelitian dan penyediaan informasi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Umar S Bakry. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Jakarta: University Press, 1999), 127.

<sup>42</sup> David Lewis and Nanzeen Kanji. *Non Government Organization and Development*. (Inggris: Routledge, 2009), 11.

<sup>43</sup> David Lewis and Nazneen Kanji. *Non Governemntal Organization and Development*. (Inggris : Routledge, 2009), 1.

Kemudian melalui bukunya, Lewis dan Kanji mengemukakan bahwa terdapat tiga peran yang dilakukan oleh NGO, yaitu sebagai *implementer*, *catalyst* dan *partner*.<sup>44</sup>

a. *Implementer*

Sebagai *implementer*, peran NGO juga di artikan sebagai *service delivery*. Peran NGO sebagai *service delivery* biasanya berkaitan dengan menyediakan atau memberikan sumber daya berupa barang dan jasa kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.<sup>45</sup> Sebagai *service delivery*, NGO berperan sebagai penyedia fasilitas dan barang jasa di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, keuangan mikro, pertanian, penyuluhan, bantuan darurat dan hak asasi manusia.<sup>46</sup>

b. *Catalyst*

*Catalyst* dapat di pahami sebagai sesuatu yang membawa perubahan, oleh sebab itu NGO di katakan memiliki kemampuan untuk dapat menginspirasi, memfasilitasi hingga berkontribusi untuk dapat menghasilkan suatu perubahan.<sup>47</sup> Sebagai *catalyst*, NGO menjalankan kegiatan seperti promosi dan kampanye untuk menghadirkan inovasi, menciptakan advokasi pekerjaan, pembentukan kelompok, hingga membentuk pemberdayaan berbasis gender.<sup>48</sup> Kegiatan yang di lakukan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 12.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> *Ibid*, 12-13.

<sup>47</sup> *Ibid*, 13.

<sup>48</sup> *Ibid*.

biasanya mengarah dan mengikutsertakan individu, masyarakat lokal, NGO dan aktor lain yang memiliki hubungan dengan isu yang sedang di bawa.

c. *Partner*

Peran NGO sebagai *partner* adalah dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, pemberi donor hingga pihak-pihak eksternal lainnya.<sup>49</sup> Dimana kegiatan *partnership* tersebut di lakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, efektif, responsif dan tidak tergantung antar pihak kerjasama.<sup>50</sup> Sehingga, akan terciptanya kesamaan tujuan dan penguatan kapabilitas sebuah NGO dalam mencapai agendanya.<sup>51</sup>

Melalui ketiga peran yang telah dijelaskan oleh David Lewis dan Nanzeen Kanji tersebut, sebuah NGO dapat dinilai telah melakukan sebuah upaya *humanitarian action* (aksi kemanusiaan). Adapun pengertian dan tujuan terkait aksi kemanusiaan menurut David Lewis dan Nazneen Kanji adalah :<sup>52</sup>

1. Aksi kemanusiaan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan beban selama dan setelah terjadinya krisis maupun bencana alam, serta untuk memperkuat kesiagaan ketika situasi tersebut terjadi kembali.
2. Tindakan kemanusiaan harus dijalankan bersamaan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, yang berarti memiliki tujuan utama untuk menyelamatkan hidup manusia hidup serta berupaya mengurangi penderitaan di mana pun

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 188.

hal tersebut ditemukan. Kemudian penerapan keadilan, artinya pelaksanaan dilakukan dengan tanpa diskriminasi. Selanjutnya menerapkan aspek netralitas, artinya tindakan kemanusiaan tidak boleh memiliki tujuan lain seperti politik, ekonomi maupun militer.

3. Tindakan kemanusiaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil, baik seperti menyediakan makanan, air dan sanitasi, tempat tinggal, layanan kesehatan serta barang-barang bantuan lainnya. Tindakan kemanusiaan dilakukan untuk membantu memfasilitasi orang yang terkena dampak untuk dapat membangun kembali kehidupan yang normal.

### **2.3 Kontekstualisasi**

Konsep Peran *Non Governmental Organization* milik David Lewis dan Nazneen Kanji, berupaya untuk menjelaskan bagaimana peran sebuah NGO dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat lainnya yang membutuhkan. Melalui konsep ini, penulis akan membahas mengenai peran serta dampak yang diberikan oleh *Anti Slavery* terhadap praktik perbudakan di Mauritania pada tahun 2013 hingga tahun 2018.

Melalui pembahasan terkait *implementer*, sebuah NGO dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka berperan menggantikan peran pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat. Dalam melihat upaya *Anti Slavery* dalam usahanya menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania, penulis kemudian akan menggunakan variabel ini untuk mengukur sejauh mana *Anti Slavery* telah menyediakan bantuan-bantuan atau fasilitas yang seharusnya difasilitasi oleh

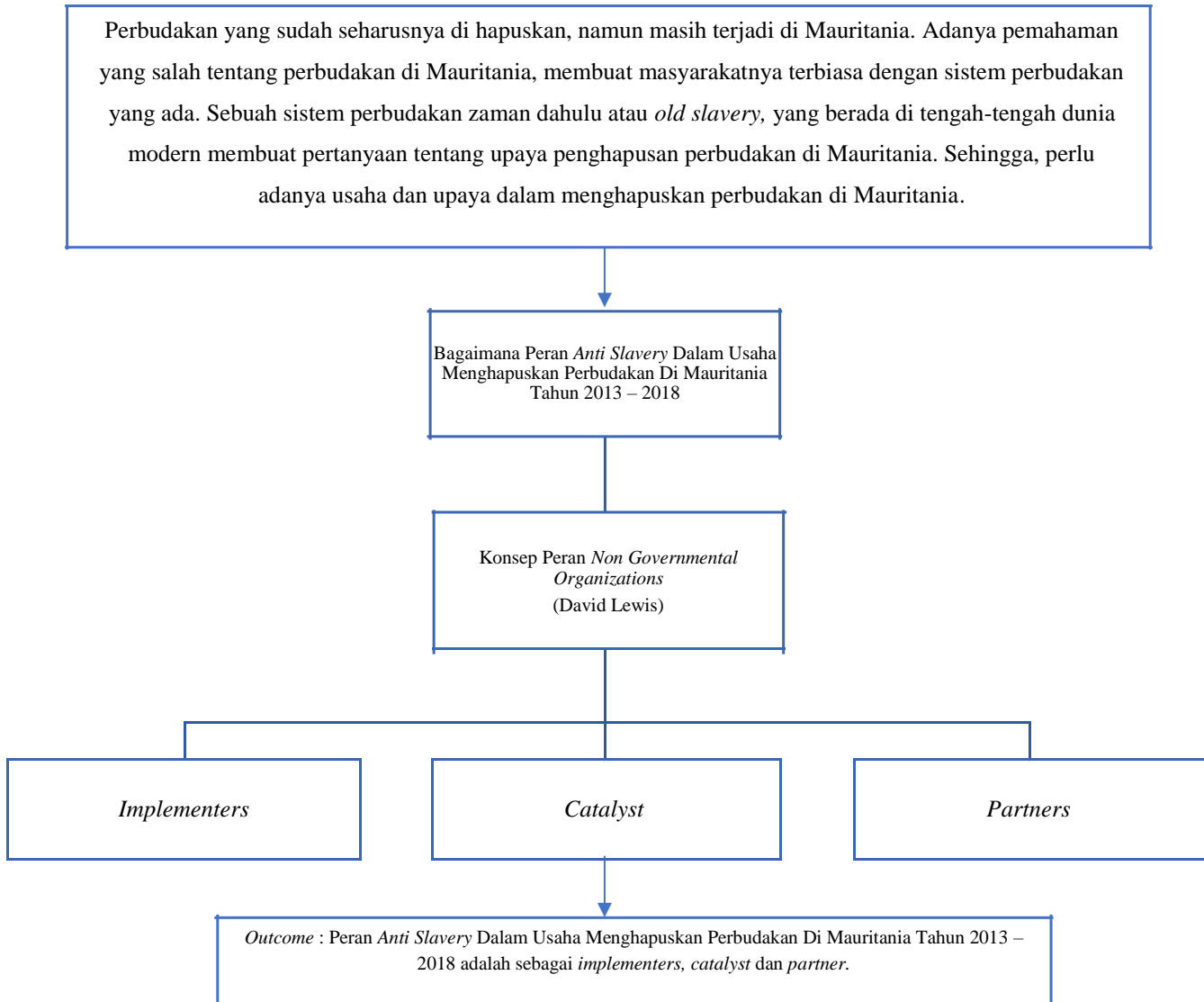


pemerintah namun pada kenyataannya sulit untuk diakses oleh masyarakat tertentu. Melalui variabel ini penulis juga akan melihat bagaimana urgensi pemberian bantuan, serta dampak yang diterima oleh masyarakat sebagai bentuk usaha menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania pada tahun 2013 hingga 2018.

Kemudian melalui variabel *catalyst*, penulis akan melihat bagaimana upaya *Anti Slavery* menginspirasi hingga berhasil menghasilkan perubahan di kehidupan masyarakat terutama kepada orang-orang yang terkena dampak dari praktik perbudakan. Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana peran *Anti Slavery* dalam usaha menghapuskan praktik perbudakan melalui perannya sebagai *catalyst* akan penulis lihat berdasarkan hasil *output* kegiatan yang dilakukan. Kemudian penulis mencoba mengukur bagaimana kegiatan yang telah dilakukan dapat menghasilkan suatu perubahan yang bertahan lama dalam kehidupan masyarakat.

Melalui variabel *partner*, penulis akan melihat bagaimana *Anti Slavery* melakukan kerja sama dan menjalin hubungan kemitraan bersama dengan pihak eksternal namun tetap berada pada posisi yang netral serta independen untuk dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania. Sehingga, melalui keseluruhan konsep peran NGO ini penulis dapat melihat bagaimana keberhasilan peran yang telah dicapai oleh *Anti Slavery* untuk menyentuh setiap akar permasalahan yang ada terhadap usaha menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania tahun 2013 hingga 2018.

## 2.4 Alur Pemikiran



Bagan 1 Bagan Alur Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi.<sup>53</sup> Melalui penelitian deskriptif penulis dapat memotret peristiwa yang menjadi fokus penelitiannya yang kemudian dapat dijelaskan serta digambarkan sebagaimana adanya<sup>54</sup> dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif ini dilakukan berdasarkan pada metode kualitatif, yang mana penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk dapat mendeskripsikan sebuah fenomena dengan menunjukkan bukti-buktinya.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui peran *Anti Slavery* dalam usaha menghapuskan perbudakan di Mauritania tahun 2013 – 2018.

#### **3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus terhadap usaha yang dilakukan oleh *Anti Slavery* dalam menghapuskan perbudakan di Mauritania. Dalam hal ini berarti penulis berfokus kepada peran *Anti Slavery* sebagai organisasi internasional yang berusaha menghapuskan *slavery* di Mauritania secara khusus pada tahun 2013-2018.

---

<sup>53</sup>Nana Sujana and Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. (Bandung: Sinar Baru, 1989),

65.

<sup>54</sup>*Ibid*, 66.

<sup>55</sup>Rachmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Prenada, 2006), 12.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terkait dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan studi pustaka. Menurut Nazir, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah semua literatur, catatan dan sumber lain yang relevan serta memiliki hubungan terhadap suatu permasalahan yang di teliti.<sup>56</sup> Melalui teknik ini, maka data yang di hasilkan adalah data sekunder.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang di jelaskan oleh Milles dan Huberman. Dalam melakukan analisa data, terdapat tiga aktivitas yang perlu di lakukan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).<sup>57</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan menyeleksi, memfokuskan serta menyederhanakan semua data yang telah di dapatkan.<sup>58</sup> Reduksi data dilakukan dengan cara melakukan pemilihan, menajamkan, memusatkan perhatian pada fokus isu sehingga dapat membuang data yang tidak perlukan. Namun, reduksi data harus di lakukan secara terus menerus selama penelitian masih berlangsung.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

---

<sup>56</sup> Moh Nazir. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 93.

<sup>57</sup> *Ibid*, 246.

<sup>58</sup> Mansur Muslich. *Melaksanakan PTK Itu Mudah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 52.

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk narasi yang berisi semua informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi data. Sehingga dengan demikian, kesimpulan dapat di tarik dan di verifikasi.<sup>59</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahapan terakhir dalam melakukan analisa data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan secara utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan semenjak penulis memperoleh data dari awal penelitian. Dalam melakukan penarikan kesimpulan, perlu adanya verifikasi data yang di dukung melalui pola-pola, pernyataan, konfigurasi dan berbagai proporsi lainnya<sup>60</sup> sehingga dapat membentuk kesimpulan akhir.

## 3.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah yang di teliti, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Lebih

---

247. <sup>59</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. (Kartasura: Fairus Media, 2008),

<sup>60</sup>*Ibid*, 247-248.

jelas lagi, bab ini menjelaskan gambaran mengenai isu penelitian dan memberikan gambaran terkait arah penelitian yang akan di lakukan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini, terdapat penjelasan yang berisi tentang kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian penulis. Bab ini terdiri dari studi terdahulu, kerangka teori yang akan di gunakan terhadap kasus yang di angkat serta agumen utama penulis.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, teknik pengumpulan data, ruang lingkup hingga sistematika dalam penulisan. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian terkait isu yang di bawa.

## **BAB IV : Gambaran Umum**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang perbudakan di Mauritania baik dari sejarah hingga praktiknya. Dalam bab ini juga, penulis membahas tentang peran *Anti Slavery* dalam usaha menghapuskan perbudakan di Mauritania sebagai organisasi internasional yang telah penulis pilih untuk menjadi fokus penelitian.

## **BAB V : Pembahasan**

Melalui bab ini penulis akan membahas serta menjelaskan penjelasan mengenai upaya *Anti Slavery* dalam usaha menghapuskan perbudakan di

Mauritania dengan rentang waktu tahun 2013 hingga 2018 menggunakan konsep peran organisasi internasional milik David Lewis dan Nazneen Kanji.

## **BAB VI : Penutup**

Terakhir, bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sekaligus saran yang akan di tujukan kepada pembaca terkait penelitian penulis.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Perbudakan di Mauritania

Perbudakan, memiliki sejarah yang panjang di negara Mauritania. Bermula pada abad ke-9, *White Moor* yang merupakan keturunan *Arab-Berber* datang dan menetap di berbagai desa dan wilayah Mauritania. Semenjak kedatangannya, *White Moor* berhasil menciptakan sistem feodal melalui asimilasi dan penaklukan penduduk asli Mauritania.<sup>61</sup> Kemudian pada abad ke 17 kolonial Prancis dengan membawa pedagang Portugal mulai memasuki wilayah Afrika dan salah satunya adalah Mauritania, untuk menjalankan bisnis budak atau perbudakan.<sup>62</sup> Pada masa itu, kolonial Prancis berkerjasama dengan *White Moors* dalam urusan penyediaan budak. Semenjak adanya kerjasama tersebut, *White Moors* mulai melakukan penangkapan secara paksa serta menjualkan orang-orang keturunan non-Arab di Mauritania untuk di tukarkan dengan senjata api, baju, gula dan anggur.<sup>63</sup> Pada abad ke 19, *White Moor* semakin mengencangkan cengkeraman mereka di berbagai daerah Mauritania dengan melakukan indoktrinasi seperti pemahaman tentang ras dan kelas serta dogma agama untuk mendukung perbudakan kepada *Haratines* atau *Black Moor*.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Aaron Baxter and Shannon Garcia, *A ROADMAP TO WHERE? The Haratin and the Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery*. (Portland : Lewis and Clark Law School, 2014), 1.

<sup>62</sup> Kevin Bales. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. (Berkley: University of California, 2012), 92.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Aaron Baxter and Shannon Garcia. *A ROADMAP TO WHERE? The Haratin and the Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery*. (Portland: Lewis and Clark Law School, 2014), 2–3.



Sebagian besar praktik perbudakan di Mauritania, terjadi di daerah terpencil dan pedesaan. Praktik perbudakan di Mauritania juga terjadi dalam bentuk lainnya seperti pernikahan paksa, pekerja anak, dan juga perbudakan rumah tangga. Di daerah pedesaan, budak yang telah melarikan diri sering kembali ke tuannya karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Beberapa mantan budak di daerah pedesaan juga seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepemilikan tanah dan beberapa dipaksa untuk memberikan persentase hasil mereka untuk mantan tuan mereka. Akibatnya, meskipun mereka mungkin "dibebaskan", mantan budak masih diperlakukan seperti budak. Mantan budak dari daerah pedesaan yang melarikan diri dari tuannya atau yang dibebaskan lebih lanjut diperbudak di pusat-pusat kota. Para korban dari praktik perbudakan ini menemukan diri mereka kembali sebagai budak hasil diskriminasi, dikarenakan kurangnya pendidikan atau pelatihan kejuruan dan kurangnya sarana untuk menemukan mata pencaharian alternatif.<sup>65</sup>

Pada tahun 2013 organisasi dan kelompok peneliti di Mauritania berhasil melakukan penelitian terkait praktik perbudakan yang terjadi pada etnis *Haratine* dan mengeluarkan manifesto berjudul *a Haratine Manifesto*. Dalam manifesto tersebut menjelaskan bahwa etnis *Haratine* mewakili 85% dari total populasi buta huruf di Mauritania. Lebih dari 80% etnis *Haratine* belum menyelesaikan pendidikan dasar dan hanya 5% etnis *Haratine* yang terdaftar di pendidikan tinggi. Lebih dari 90% yang merupakan pekerja pelabuhan, pekerja rumah tangga dan

---

<sup>65</sup>United Nations Human Right Council, “*Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian*”, [https://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2\\_en.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2_en.pdf) (accessed 2020, Februari 2020).

dibayar rendah. Hanya 2% dari etnis *Haratine* yang terlibat dalam sektor publik dan swasta. Serta kelompok etnis *Haratine* juga dikecualikan dari posisi level di militer, pasukan keamanan dan juga kurang terwakili di lembaga keagamaan.<sup>66</sup>

Dalam praktik perbudakan di Mauritania, wanita paling rentan mengalami risiko karena mereka seringkali mengalami diskriminasi sebagai wanita, sebagai ibu dan ketiga sebagai budak. Mereka dilihat oleh tuan mereka pertama sebagai tenaga kerja dan kedua sebagai penghasil tenaga kerja. Budak perempuan yang tinggal di rumah tuannya jarang diijinkan keluar dari kamp dan umumnya bekerja dari sebelum matahari terbit setelah matahari terbenam. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh budak wanita adalah merawat anak-anak tuan, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar, menumbuk millet, memindahkan tenda yang terbuat dari kulit binatang yang tebal dan melakukan tugas rumah tangga lainnya. Perempuan dalam perbudakan sering menerima praktik kekerasan seperti dipukuli dan terkadang diperkosa oleh tuannya yang menganggap mereka sebagai milik mereka. Anak-anak mereka juga dianggap sebagai milik tuan dan, bersama dengan budak lain, dapat disewakan atau dipinjamkan atau diberikan sebagai hadiah dalam pernikahan.<sup>67</sup>

Selain itu, seorang tuan mungkin mengizinkan pernikahan tetapi menolak untuk "membebaskan" budak sehingga memastikan bahwa melalui pernikahan,

---

<sup>66</sup> Anti Slavery, 2015, "*Joint submission for the Universal Periodic Review of Mauritania*", [https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/1\\_upr\\_submission\\_on\\_mauritania\\_2015.pdf](https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/1_upr_submission_on_mauritania_2015.pdf) (accessed 2020, februari 15).

<sup>67</sup> Gulnara Shahinian, 2010, "*Report Of The Special Rapporteur On Contemporary Forms Of Slavery, Including Its Causes And Consequences*", [https://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2\\_en.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2_en.pdf) (accessed 2020, Februari 20).

tuan membuat suami budak perempuan dan anak-anak masa depan bekerja untuknya atau kerabatnya. Kemudian ketika seorang budak diizinkan menikah, mahar dapat direbut oleh tuannya. Sebagai tuan, mereka juga dapat memaksa pemisahan atau perceraian antara budak yang sudah menikah. Di dalam situasi ini, biasanya budak laki-laki dipaksa untuk pergi melalui serangkaian ancaman verbal dan fisik. Budak laki-laki seringkali dipandang sebagai ancaman bagi keluarga tuannya dikhawatirkan dapat memengaruhi kepemilikan properti tuan (budak perempuan dan anak-anak mereka).<sup>68</sup>

Setiap budak di Mauritania telah menjadi seorang budak sejak kecil. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal orang tua atau saudara mereka. Tuan-tuan mereka, sebagai kerabat sosial menjadi hal yang paling dekat dengan keluarga. Ini membuatnya lebih sulit bagi anak-anak yang diperbudak untuk melarikan diri. Dalam kasus-kasus perbudakan, anak-anak yang diperbudak di pedesaan biasanya bekerja merawat ternak, menanam tanaman dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan anak-anak dalam kondisi seperti perbudakan di daerah perkotaan sering ditemukan bekerja di rumah tangga domestik. Anak-anak yang menjadi budak, terkadang memilih untuk tetap menjadi budak karena mereka tidak ingin meninggalkan orang tua mereka biasanya ibu, karena tidak akan ada yang merawat mereka.<sup>69</sup>

Praktik perbudakan di Mauritania juga meliputi pernikahan dini yang dipaksakan, beberapa di antaranya gadis-gadis yang terlibat diperdagangkan untuk

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

pernikahan paksa ke negara lain. Selain itu, budak yang telah lanjut usia masih diharapkan bekerja oleh tuan-tuan mereka. Di beberapa kasus, banyak korban praktik perbudakan ingin membawa orang tuanya untuk ikut melarikan diri. Namun, kemudian orang tuanya menolak untuk pergi karena masih mempercayai dogma agama bahwa meninggalkan tuannya akan menghasilkan sanksi agama sanksi. Selama bertahun-tahun, para budak telah diberitahu bahwa jika mereka melakukan apa yang diperintahkan tuannya kepada mereka, mereka akan pergi ke surga tetapi jika mereka meninggalkan tuan mereka, mereka meninggalkan surga. Hal ini merupakan mekanisme yang dapat mengontrol para budak para budak untuk mengikuti perintah tuannya dan menerima nasib mereka. Tanpa akses ke pendidikan, banyak dari korban praktik perbudakan percaya bahwa hal tersebut adalah harapan Tuhan bagi mereka untuk menjadi budak.<sup>70</sup>

Praktik perbudakan di Mauritania, menjadikannya sebagai kasus khusus dan berbeda dengan praktik perbudakan di negara lainnya. Hubungan antara tuan dan budak dalam sistem perbudakan Mauritania menjadi hal yang sangat kompleks. Dalam praktik perbudakan di Mauritania, dapat di temui hubungan yang intim hingga eksploitasi brutal antara tuan dan budaknya.<sup>71</sup> Berdasarkan pernyataan seorang budak yang dikutip dari buku Kevin Bales yaitu,

*“Hubungan antara saya dan tuan saya telah dianggap seperti teman yang baik, atau bahkan keluarga. Banyak budak yang akan*

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Kevin Bales. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. (Berkley: University of California, 2012), 85.

*meninggalkan tuannya tetapi tidak bisa, dan yang lain bisa pergi tetapi tidak mau, karena kami adalah keluarga yang baik dan Muslim yang baik. Dan juga, jika kita meninggalkan tuan kita, kita pergi tanpa apa-apa. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada jaminan makanan atau pakaian. Serta beberapa budak perempuan jatuh ke dalam keputusasaan dan menjadi pelacur juga mengalami kelaparan”<sup>72</sup>*

Kutipan di atas berhasil menunjukkan bagaimana salah satu persepsi terkait hubungan antara seorang budak dengan tuannya. Selain itu, kutipan di atas juga menunjukkan adanya ketakutan akan ke tidak terjaminan hidup seorang budak apabila meninggalkan tuannya. Sedangkan di cerita lainnya, juga terdapat kisah kekerasan dan kekejaman yang di lakukan oleh tuannya kepada budaknya di Mauritania,

*“Saya tumbuh sebagai budak untuk sebuah keluarga, dan anak-anak saya juga tumbuh untuk keluarga tersebut. Suatu hari mereka mengirim kami ke tuan yang baru di rumah lain. Kemudian, tuan baru tersebut mengatakan dia ingin menikah dengan saya, tetapi saat itu saya sedang berada dalam masa kehamilan. Ketika dia mengetahui tentang kehamilan tersebut, dia memutuskan untuk menikahi putri tertua saya. Setelah pernikahan terjadi, seringkali saya mengawasinya memperkosa putri saya dengan todongan*

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

*senjata. Kemudian putri saya hamil, tetapi dia tidak ingin istrinya mengetahuinya dan dia membuat kami masuk ke dalam mobilnya lalu kemudian mulai mengemudi keluar dan melewati bukit pasir dengan sangat cepat. Sehingga membuat putri saya keguguran.”<sup>73</sup>*

Kutipan kisah di atas berhasil menunjukkan bahwa praktik perbudakan di Mauritania masih menerapkan kekerasan dan kekejaman. Sehingga hal ini menjadi hal yang berlawanan dengan norma internasional bahwa perbudakan di atas dunia adalah suatu hal yang dilarang, seperti yang tertuang di *Universal Declaration of Human Rights* pada artikelnnya yang ke empat yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat berada di dalam perbudakan serta perbudakan merupakan hal yang dilarang dalam berbagai bentuknya.<sup>74</sup>

#### **4.2 Kebijakan Pemerintah Mauritania**

Pemerintah Mauritania merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab terkait upaya penghapusan praktik perbudakan. Namun melalui sajian data yang di kemukakan oleh *Global Slavery Index*, penilaiain terhadap pemerintah Mauritania terkait penyelesaian kasus perbudakan terbilang sangat rendah.<sup>75</sup> Terbukti dari rendahnya pemberian dukungan kepada korban, rendahnya tingkat keadilan dalam penyelesaian kasus pidana, koordinasi dalam kasus perbudakan dan

---

<sup>73</sup> Anti Slavery, “*Moulkheir, Mauritania*”, <https://www.antislavery.org/impact/stories/moulkheir/> (accessed November 10, 2019).

<sup>74</sup> *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (accessed November 11, 2019).

<sup>75</sup> Anti Slavery, “*Government Response Rating : Africa, 2018*”, <https://www.globalsslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/africa/> (accessed October 24, 2019).

juga rendahnya pasokan kebutuhan dari pemerintah bagi korban perbudakan seperti pekerjaan, pendidikan serta kebutuhan lainnya.<sup>76</sup>

Rendahnya peran pemerintah dalam penyelesaian kasus perbudakan di Mauritania di jelaskan oleh Menteri Pembangunan Pedesaan Mauritania yaitu Brahim Ould M'Bareck Ould Med El Moctar, berlandaskan dengan adanya hubungan antara tuan dan budaknya yang merasa sebagai keluarga serta memiliki kepentingan ekonomi maka dari itu pemerintah mengatakan bahwa Mauritania telah terbebas secara total dari perbudakan.<sup>77</sup>

Upaya penghapusan praktik perbudakan di Mauritania sebelumnya, telah di lakukan semenjak Mauritania melakukan abolisi melalui *The Abolition Act* 1833. Pada tahun 1981, Mauritania menjadi negara terakhir yang melakukan abolisi terkait perbudakan. Setelah melakukan abolisi, pemerintah Mauritania juga menetapkan *decreed* yang menyatakan bahwa perbudakan sudah berakhir dan tidak akan hadir kembali di Mauritania.<sup>78</sup> Setelah abolisi dan *decreed* di lakukan oleh pemerintah, ternyata hal tersebut tidak terlalu merubah kehidupan dan praktik perbudakan yang ada di Mauritania. Masih banyaknya budak yang berkeliaran di jalanan, pusat belanja, padang rumput serta ruang publik lainnya,<sup>79</sup> karena tidak adanya pemberitahuan atas kebebasan hak para budak setelah di lakukannya abolisi.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> D John Sutter, "Mauritanian Refugees Make a New Home in Ohio, 2012", <https://www.cnn.com/2012/03/17/us/mauritanian-refugees-ohio/index.html> (accessed November 20, 2019).

<sup>78</sup> Kevin Bales. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. (Berkley: University of California, 2012), 81.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Sehingga upaya yang telah dilakukan tidak mempengaruhi proses penghapusan praktik perbudakan di Mauritania secara nyata.<sup>80</sup>

Dalam ranah internasional, Mauritania merupakan bagian dari beberapa konvensi internasional hak asasi manusia yang secara tegas melarang praktik perbudakan.<sup>81</sup> Konvensi yang pertama adalah *the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, dan telah diratifikasi oleh Mauritania pada tanggal 13 bulan Desember tahun 1988.<sup>82</sup> Konvensi ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip martabat dan kesetaraan yang melekat dalam semua manusia, serta memberikan penekanan kepada negara anggotanya untuk mengambil tindakan secara bersama dan terpisah, bekerja sama dengan organisasi, kemudian mempromosikan serta mendorong penghormatan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.<sup>83</sup>

Selanjutnya yaitu *the Convention on the Rights of the Child*, Mauritania meratifikasi konvensi ini pada tanggal 16 bulan Mei tahun 1991.<sup>84</sup> Konvensi ini menegaskan tentang martabat dan hak asasi manusia serta nilai pribadi manusia,

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Rebecca Marlin, and Sarah Mathewson. *Enforcing Mauritania's Anti-Slavery Legislation: The Continued Failure of the Justice System to Prevent, Protect and Punish*. (London: British Library, 2015), 3.

<sup>82</sup> United Nations Treaty Collection, "*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*",

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-2&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en) (accessed 2020, February 20).

<sup>83</sup> United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, "*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*",

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx> (accessed 2020, February 20).

<sup>84</sup> United Nations Treaty Collection, "*Convention on the Rights of the Child*", [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-11&chapter=4&lang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en) (accessed 2020, February 20).



dengan tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. Kemudian setiap anggota yang terlibat dalam konvensi ini dituntut untuk menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Serta mengharuskan para anggota untuk menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya terutama anak-anak, dengan memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Kemudian memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya seperti tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dan harmonis, dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.<sup>85</sup>

Kemudian pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2001, Mauritania telah meratifikasi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Konvensi ini bertujuan untuk memantau situasi perempuan dan mempromosikan hak-hak perempuan. Konvensi ini juga merupakan sebuah upaya untuk memajukan perempuan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini memfokuskan perhatian kepada hak-hak perempuan dengan berupaya untuk menguraikan arti kesetaraan dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Maka dari itu, para anggota yang telah meratifikasi konvensi ini

---

<sup>85</sup> United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, “*Convention on the Rights of the Child*”, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (accessed 2020, February 20).

dituntut untuk dapat menciptakan kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>86</sup>

Terakhir yaitu Selanjutnya pada tanggal 17 bulan November tahun 2004, Mauritania telah meratifikasi *the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*.<sup>87</sup> Konvensi ini menegaskan kepada negara anggotanya untuk mengakui martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari setiap manusia merupakan fondasi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Kemudian mengakui bahwa setiap manusia bebas menikmati hak-hak ekonomi, sosial serta budayanya, hak-hak sipilnya dan juga hak politiknya.<sup>88</sup>

Selain itu dalam ranah regional, Mauritania juga telah meratifikasi beberapa instrumen seperti *the African Charter on Human and Peoples Rights*. Melalui carter ini, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan kehidupan yang bebas kepada masyarakat di Afrika.<sup>89</sup>

Kemudian *the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*, protokol ini menjelaskan tentang hak asasi

---

<sup>86</sup>United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, "*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*", <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx> (accessed 2020, February 20).

<sup>87</sup>United Nations Treaty Collection, "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*", [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg\\_no=IV-3&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en) (accessed 2020, February 20).

<sup>88</sup>United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*", <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> (accessed 2020, February 20).

<sup>89</sup>"*African Charter On Human And Peoples Rights*", <http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf> (accessed 2020, February 20).

manusia dan mengutamakan prinsip non-diskriminasi pada ras, kelompok etnis, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal negara dan sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Melalui piagam ini, semua pihak negara harus berkontribusi untuk menghapus setiap diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan.<sup>90</sup>

Terakhir yaitu *the African Charter on the Rights and Welfare of the Child*, piagam ini menuntut setiap anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam hal kesehatan, fisik, mental, dan moral. Kemudian, menegaskan tentang penjaminan bahwa setiap anak berhak menikmati hak dan kebebasan yang diakui dan dijamin oleh setiap negara.<sup>91</sup>

Melalui desakkan dan keterlibatannya dalam berbagai konvensi, piagam dan protokol membuat Mauritania harus menjalankan seluruh aturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pada ranah nasional parlemen Mauritania mengesahkan Undang-Undang Anti Perbudakan yang disahkan pada tahun 2007. Pembentukan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban praktik perbudakan dan kemudian memberikan penetapan hukum bagi para pelaku praktik perbudakan.<sup>92</sup> Dalam pasal 2 UU tahun 2007, perbudakan di artikan sebagai kegiatan atas kekuasaan dan kepemilikan terhadap satu atau beberapa

---

<sup>90</sup> “*Protocol To The African Charter On Human Andpeoples' Rights On The Rights Of Women In Africa*”, [https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol\\_rights\\_women\\_africa\\_2003.pdf](https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf) (accessed 2020, February 20).

<sup>91</sup> “*African Charter On The Rights And Welfare Of The Child*”, [https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr\\_charter\\_rights\\_welfare\\_child\\_africa\\_1990.pdf](https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf) (accessed 2020, February 20).

<sup>92</sup> Unknown, 2007, “*Mauritania MPs Pass Slavery Law*”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm> ((accessed 2020, February 10).

orang. Selain itu, budak juga di jelaskan adalah orang, laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil yang berada di dalam kekuasaan kepemilikan.<sup>93</sup>

Dalam bab 2 UU tahun 2007 terdapat pembahasan terkait hukuman dan denda yang akan di terapkan pada pelaku praktik perbudakan. Pada pasal 4 UU tahun 2007, menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki budak sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan atau martabatnya maka akan di kenakan hukuman lima hingga sepuluh tahun penjara serta denda lima ratus ribu ouguiya (500.000 UM) hingga satu juta ouguiya (1.000.000 UM).<sup>94</sup> Kemudian pasal 6, menjelaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang dan mendapatkan pendapatan melalui hasil dari kerja seorang budak yang di duga atau memeras aset mereka dapat di hukum enam bulan hingga dua tahun penjara serta denda lima puluh ribu (50.000 UM) hingga dua ratus ribu ouguiya (200.000 UM). Pasal 7 UU 2007, menjelaskan tentang aturan pelanggaran terhadap perampasan hak budak anak yaitu “*setiap orang yang merampas hak seorang anak terhadap akses ke pendidikan dapat dihukum selama enam bulan hingga dua tahun penjara serta dapat di kenakan denda lima puluh ribu (50.000 UM) menjadi dua ratus ribu ouguiya (200.000 UM)*”. Kemudian pasal 11 menetapkan bahwa “*setiap individu yang bersalah atas tindakan diskriminatif terhadap seorang budak dapat di hukum dengan denda seratus ribu (100.000 UM) hingga tiga ratus ribu ouguiya (300.000 UM)*.”<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> “*Mauritania Slavery Act 2007*”, [https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/10/Mauritania-2007-anti-slavery-law\\_English.docx](https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/10/Mauritania-2007-anti-slavery-law_English.docx) (accessed 2020, January 11).

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

Menurut banyak aktivis pembebasan perbudakan di Mauritania, dalam penerapan dan implementasi UU tahun 2007 untuk mengkriminalisasi pelaku praktik perbudakan masih terhalang oleh adanya kegagalan polisi dan otoritas administratif dalam menindaklanjuti praktik perbudakan. Adanya kegagalan tersebut membuat para jaksa dan hakim tidak dapat menyelidiki setiap kasus yang dilaporkan dengan memadai.<sup>96</sup> Berdasarkan laporan hingga tahun 2015 hanya satu pemilik budak yang telah di jatuhkan hukuman, namun hukuman yang di terima masih lebih rendah dari penetapan yang ada dalam UU tahun 2007.<sup>97</sup>

Usaha menghapuskan praktik perbudakan lainnya yang di lakukan oleh pemerintah Mauritania adalah dengan membentuk sebuah badan yaitu *National Agency to Fight against the Vestiges of Slavery, Integration, and Fight against Poverty* pada tahun 2013.<sup>98</sup> Namun pembentukkan badan ini menerima banyak kritik dari berbagai pihak, terutama dari mantan budak maupun aktivis pembebasan budak. Adanya indikasi pemerintah yang tidak fokus kepada penghapusan praktik perbudakan secara keseluruhan karena menempatkan kata “*vestiges*” serta adanya pernyataan dari pemerintah yang berupaya untuk menghapuskan “sisa-sisa” praktik perbudakan, menjadi kritik utama dari banyak pihak.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Sarah Mathewson and Rebecca Marlin. *Enforcing Mauritania's Anti-Slavery Legislation: The Continued Failure of the Justice System to Prevent, Protect and Punish*. (Inggris : The British Library, 2015), 2.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Unknown, 2013, “*Création d'une Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage en Mauritanie*”, [http://www.cridem.org/C\\_Info.php?article=641097](http://www.cridem.org/C_Info.php?article=641097) (accessed 2020, January 10).

<sup>99</sup> Adam Nossiter, 2013, “*Mauritania Confronts Long Legacy of Slavery*”, <https://www.nytimes.com/2013/11/12/world/africa/mauritania-confronts-long-legacy-of-slavery.html> (accessed 2020, January 11).

Pada bulan Agustus tahun 2015, pemerintah Mauritania mengamandemen UU Anti Perbudakan yang sebelumnya telah disahkan pada tahun 2007 untuk meningkatkan hukuman terhadap pelaku praktik perbudakan. Pada aturan yang ditetapkan pada tahun 2015, para pelaku praktik perbudakan dapat dikenakan hukuman 10 tahun hingga 20 tahun penjara serta denda hingga \$ 16.000 atau yang hampir setara dengan enam ratus ribu ouguiya (600.000 UM)<sup>100</sup>. Selain itu melalui amandemen tersebut, organisasi lokal yang telah terdaftar secara hukum paling tidak selama lima tahun dapat melakukan pengajuan dan pengaduan atas nama korban perbudakan maupun praktik perbudakan.<sup>101</sup>

Pada tahun 2016 sejumlah tiga belas aktivis anti perbudakan di Mauritania dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara karena dugaan berperan dalam kerusuhan protes terkait penggusuran tempat tinggal serta pemindahan paksa penduduk daerah kumuh di ibukota Nouakchott, yang mana banyak dari mereka adalah bekas budak.<sup>102</sup> Selain itu, aktivis tersebut juga di berikan tuduhan tentang serangan terhadap pemerintah, majelis bersenjata dan keanggotaan sebuah organisasi yang tidak dikenal.<sup>103</sup> Kejadian penangkapan terhadap tiga belas aktivis tersebut menjadi pukulan telak bagi gerakan anti perbudakan, serta perlu

---

100 Bureau of International Labour Affairs, 2015, "*Mauritania Moderate Advancement.*" <https://www.justice.gov/eoir/page/file/905922/download> (accessed 2020, March 1).

<sup>101</sup> *Ibid.*

102 Edward McAllister, 2016, "*Mauritania Jails Anti-Slavery Activists For Up To 15 Years*", <https://www.reuters.com/article/us-mauritania-politics/mauritania-jails-anti-slavery-activists-for-up-to-15-years-idUSKCN10U19O> (accessed 2020, January 12).

103 Kissima Diagana, 2016, "Mauritania Jails 13 Anti-Slavery Activist", <https://www.aljazeera.com/news/2016/08/mauritania-jails-13-anti-slavery-activists-160819132028879.html> (accessed 2020, January 12).

mempertanyakan kembali janji pemerintah terkait upaya menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania.

### **4.3 *Anti Slavery***

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang perbudakan, *Anti Slavery* terus berupaya untuk memajukan agenda politik tentang perbudakan melalui penelitian, advokasi, kampanye dan bekerjasama dengan komunitas lokal.<sup>104</sup>

Secara praktik, organisasi ini bekerja di tingkat struktural serta tingkat akar rumput untuk mengubah kebijakan dan praktiknya, untuk mendorong perubahan perilaku dan menciptakan norma-norma sosial baru yang memungkinkan setiap orang dapat mengklaim hak asasi mereka. Selain itu *Anti Slavery* juga melakukan pendekatan dengan menjangkau orang-orang yang di anggap rentan terhadap perbudakan dan eksploitasi.<sup>105</sup>

Di lebih dari 20 negara, *Anti Slavery* melibatkan kerja sama yang erat dengan sekitar 40 organisasi mitra lokal dan memiliki beragam kemitraan di luar proyek formal. Kerja sama yang dijalin bersama dengan organisasi mitra akar rumput ditujukan untuk memastikan kredibilitas advokasi di tingkat internasional dan nasional, sehingga memungkinkan untuk menciptakan pengaruh dan perubahan yang luas dan relevan. Kemudian dalam upaya untuk melakukan advokasi di tingkat global, *Anti Slavery* juga bekerjasama dengan berbagai mitra termasuk sesama

---

<sup>104</sup> Anti Slavery, "*How We Work to End Slavery*", <https://www.antislavery.org/what-we-do/how-we-work/> (accessed 2020, February 20).

<sup>105</sup> *Ibid.*

organisasi anti-perbudakan, serikat pekerja, universitas, pemilik bisnis, organisasi internasional.<sup>106</sup>

Dalam mencapai misinya menghapuskan praktik perbudakan di seluruh dunia, *Anti Slavery* mulai masuk ke Mauritania semenjak tahun 2007 dengan cara melaporkan praktik perbudakan terlebih dahulu melalui *UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery*.<sup>107</sup> *UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery* merupakan sebuah mekanisme terbaru yang dibentuk oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 30 tahun terakhir sebelum tahun 2007. Mekanisme ini bertujuan untuk menjadi tempat pelaporan, terkait bentuk-bentuk perbudakan yang sedang terjadi termasuk penyebab maupun konsekuensinya. Melalui mekanisme ini pelapor di fokuskan untuk memeriksa dan melaporkan semua bentuk perbudakan dan praktik perbudakan yang selama ini tidak tercakup oleh mandat Dewan HAM<sup>108</sup>, seperti kerja paksa, perbudakan anak, perbudakan seksual, pernikahan paksa dan penjualan istri.<sup>109</sup> Sehingga dengan adanya sistem ini maka dapat mewujudkan penerapan norma dan standar internasional yang relevan tentang perbudakan dengan merekomendasikan tindakan-tindakan yang

---

<sup>106</sup> Anti Slavery, “Partners”, <https://www.antislavery.org/about-us/partners/> (accessed 2020, February 20).

<sup>107</sup> Anti Slavery, 2017, “Help Us Finished What We Started”, <https://www.antislavery.org/abolition/> (accessed 2020, February 20).

<sup>108</sup> International Labour Organization, 2007, “Appointment of a Special Rapporteur on contemporary forms of slavery”, [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS\\_085089/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_085089/lang--en/index.htm) (accessed 2020, February 20).

<sup>109</sup> United Nations Human Rights, 2014, “Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences”, <https://www.ohchr.org/en/issues/slavery/srslavery/pages/srslaveryindex.aspx> (accessed 2020, February 20).



dapat menghilangkan praktik perbudakan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>110</sup>

Dalam usahanya mendorong kriminalisasi perbudakan di Mauritania melalui pelaporan khusus, *Anti Slavery* berkerjasama dengan *Sos-Esclaves* untuk mencari fakta-fakta terkait perbudakan di Mauritania. Gulnara Shahinian sebagai pelapor khusus yang mewakili *Anti Slavery* dan *Sos-Esclaves*, berhasil menemukan fakta dan melaporkan bahwa adanya praktik perbudakan yang terjadi di Mauritania. Melalui laporannya, pelapor menyatakan bahwa perbudakan di Mauritania mencakup semua bentuk perbudakan seperti pekerja anak, pekerja rumah tangga, pernikahan anak dan perdagangan manusia. Selain itu dalam pelaporannya, *Anti Slavery* memperkirakan pada tahun 2007 terdapat 18 persen populasi Mauritania (lebih dari setengah juta orang) ditahan sebagai budak yang mana perbudakan tersebut memiliki akar historis dalam kepemilikan populasi kulit hitam pribumi atau *Black Moors* oleh elit *Arab-Berber* yang berkuasa atau *White Moors*. Sehingga pada tahun 2009 *United Nations* mengkonfirmasi bahwa praktik perbudakan masih terjadi di Mauritania,<sup>111</sup> dengan kemudian membuat perjanjian bersama pemerintah yang berisikan tujuan tentang memerangi diskriminasi dan perbudakan pada 22 September 2009.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> International Labour Organization, 2007, “*Appointment of a Special Rapporteur on contemporary forms of slavery*”, [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS\\_085089/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_085089/lang--en/index.htm) (accessed 2020, February 20).

<sup>111</sup> *Anti Slavery*, 2009, “*UN Confirms Slavery in Mauritania*”, <https://www.antislavery.org/un-confirms-slavery-mauritania/> (accessed 2020, February 10).

<sup>112</sup> United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, “*OHCHR in Mauritania*”, <https://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/OHCHRMauritania.aspx> (accessed 2020, February 12).

### 4.3.1 Program

Setelah berhasil melaporkan praktik perbudakan di Mauritania, *Anti Slavery* kemudian mulai mengimplementasikan program dan usahanya di tahun selanjutnya sebagai bentuk untuk terus mengupayakan penghapusan praktik perbudakan. Di Mauritania, *Anti Slavery* bersama mitra lokalnya memberikan berbagai dukungan serta fasilitas kepada korban perbudakan dengan tujuan agar dapat membantu orang-orang melarikan diri dari perbudakan dan membangun kembali kehidupan mereka sebagai orang-orang yang bebas. Adapun program-program yang dilakukan oleh *Anti Slavery* adalah berikut:<sup>113</sup>

1. *Enabling People to Leave Slavery*, program ini bertujuan untuk memungkinkan orang-orang meninggalkan praktik perbudakan melalui kerja sama dengan organisasi serta mitra lokal agar dapat menjangkau orang-orang yang paling rentan terhadap perbudakan dan eksploitasi. Program ini di implementasikan oleh *Anti Slavery* melalui kerjasama dengan mitra lokalnya di Mauritania yaitu *Sos-Esclaves*.
2. *Helping Victims of Slavery*, melalui program ini *Anti Slavery* dan mitranya berusaha memastikan bahwa para korban perbudakan dapat mengakses dukungan psikologis, pendidikan, hukum keadilan serta kompensasi yang di butuhkan untuk pemulihan. Di Mauritania, *Anti Slavery* menyediakan serta memberikan dukungan keuangan seperti pinjaman mikro, penyediaan *shelter* sebagai tempat tinggal dan pelatihan kejuruan, dan juga membantu

---

113 *Anti Slavery*, "How We Work to End Slavery", <https://www.antislavery.org/what-we-do/how-we-work/> (accessed 2020, February 20).

korban praktik perbudakan untuk mengajukan kasus-kasus di pengadilan hingga memastikan para korban perbudakan mendapatkan dukungan psikologis dan hukum yang mereka butuhkan untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi.

3. *Supporting The Empowerment of People to Be Better Protected From Slavery*, program ini berisi kegiatan tentang mendukung dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar terlindungi dengan lebih baik dari perbudakan melalui pemberian edukasi terkait penghapusan ketidakseimbangan kasta dan *gender*.

Selain menjalankan program-program tersebut, *Anti Slavery* juga berupaya untuk menginspirasi dan menciptakan perubahan. Dalam upayanya menciptakan perubahan, *Anti Slavery* kemudian mengidentifikasi terlebih dahulu cara untuk mengakhiri praktik perbudakan melalui penelitian dan analisis yang berasal dari mitra lokal kerjasamanya. Setelah berhasil mengumpulkan informasi dan menerbitkan laporan tentang pelanggaran HAM ini, *Anti Slavery* berupaya membawanya ke perhatian publik dan mempromosikan aksi publik untuk mengakhiri praktik perbudakan melalui media dan kampanye pendukung. Kemudian *Anti Slavery* juga bergerak melakukan advokasi dan lobi ke negara-negara yang bersangkutan untuk legislasi kebijakan dan praktik serta meminta pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga internasional seperti *United*

*Nations, Europa Union, African Union* dan *International Labour Organization* serta bisnis dan organisasi lainnya untuk mengakhiri perbudakan.<sup>114</sup>

#### **4.3.2 Pendanaan**

Sebagai INGO yang berdiri secara independen, *Anti Slavery* tentu perlu melibatkan banyak pihak yang dapat mendukung segala kegiatannya. Dalam menjalankan upayanya untuk mencapai tujuan utamanya menghapuskan praktik perbudakan di seluruh dunia, *Anti Slavery* melakukan pengumpulan dana melalui penjualan publikasi. Penjualan publikasi dimaksud seperti penjualan konten fotografi dan juga majalah yang memuat terkait praktik perbudakan di seluruh dunia. Selain mendapatkan dana dari program penjualan, *Anti Slavery* juga mendapatkan dana dari adanya program keanggotaan yang bersifat *online*, yang mana anggota tersebut berhak mendapatkan *update* dan informasi terkait kegiatan secara berkala seperti kampanye, *past projects*, laporan keuangan baik uang yang diterima maupun dikeluarkan, hingga dapat memberikan suara pada isu-isu utama pada rapat umum tahunan yang berpengaruh pada kinerja *Anti Slavery* dalam melakukan gerakan.<sup>115</sup>

Selain mendapatkan dana secara mandiri, *Anti Slavery* juga mengandalkan donasi dari individu yang memiliki *concern* terhadap isu perbudakan. Individu tersebut biasanya disebut sebagai pendonor yang bersedia membantu *Anti Slavery* menjalankan kegiatannya. Selain donor yang berasal dari individu, sumber dana

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Anti Slavery*, "Take Action Become a Member", <https://www.antislavery.org/take-action/become-a-member/> (accessed 2020, February 17).

yang didapatkan oleh *Anti Slavery* juga berasal dari dana hibah yang di dapatkan melalui pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari artis hingga aktivis lokal.<sup>116</sup>

Sebagai organisasi yang memiliki *partner*, tentu *Anti Slavery* memiliki rekan kerjasama dan afiliasi yang di percaya. *Partner* kerjasama yang dimiliki oleh *Anti Slavery* juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan dana terkait implementasi kegiatan yang dilakukan. Adapun *partner* tersebut terdiri dari yayasan dan juga perusahaan atau korporasi.<sup>117</sup> Dana yang telah berhasil didapatkan melalui berbagai sumber, dapat digunakan untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang oleh *Anti Slavery* untuk mengupayakan penghapusan praktik perbudakan. Walaupun terkadang, jumlah uang yang didapatkan dari berbagai sumber tidak selalu mencukupi jumlah pengeluaran untuk menjalankan kegiatan.

Pada tahun 2013 dana yang diterima oleh *Anti Slavery* dari berbagai sumber berjumlah £ 2.561.851, kemudian dana yang menjadi pengeluaran pada tahun tersebut hanya mencapai £ 1.907.647. Dana tersebut berhasil digunakan oleh *Anti Slavery* untuk dapat mengadakan sesi pelatihan kepada pekerja lokal di Mauritania sebagai bentuk dukungan sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan melakukan pelaporan terkait kasus perbudakan yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian memberikan dana kepada 20 wanita keturunan budak di Mauritania untuk meningkatkan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bersama dan

---

<sup>116</sup> Anti Slavery, 2014, "Annual Review", <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2014.pdf> (accessed 2020, February 17).

<sup>117</sup> *Ibid.*

pendapatan independen. Membantu memastikan mereka dapat mengakses hak dan hak hukum, serta membebaskan anak-anak mereka dari pekerja anak, yang kemudian diberi akses kepada pendidikan.<sup>118</sup>

Kemudian pada tahun 2014 jumlah pemasukan yang diterima oleh *Anti Slavery* sejumlah £ 1.723.829, akan tetapi jumlah pengeluaran tahun tersebut mencapai £ 2.107.990. Pengeluaran tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan kampanye dan advokasi, serta teralokasikan dalam kegiatan terkait upaya penghapusan praktik perdagangan manusia, kerja paksa, dan juga perbudakan. Beberapa kegiatan tersebut yaitu memberikan bantuan non-kondisional, mengadakan pemberian edukasi dan informasi terkait kerentanan serta risiko migrasi, pemenuhan biaya penyelidikan untuk mengumpulkan bukti kerja paksa, berkontribusi pada pemberian akses pendidikan anak-anak serta upaya pembebasan dari pekerja terikat, membantu memenuhi biaya layanan medis, konseling dan tempat berlindung bagi orang yang baru saja diselamatkan dari perbudakan, membantu membayar pekerja sosial di tempat penampungan serta berkontribusi terhadap biaya pengejaran melalui pengadilan kasus-kasus mantan korban perbudakan.<sup>119</sup>

Pada tahun 2015 pemasukan yang didapatkan oleh *Anti Slavery* sejumlah £ 2.356.602, kemudian dana yang dikeluarkan sejumlah £ 2.113.604. Dana tersebut dikeluarkan dan digunakan untuk membantu memenuhi biaya layanan medis,

---

<sup>118</sup> Anti Slavery, 2013, “*Annual Review 2013*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2013-small.pdf> (accessed 2020, February 17).

<sup>119</sup> Anti Slavery, 2014, “*Annual Review 2014*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2014.pdf> (accessed 2020, February 17).

konseling dan tempat berlindung bagi orang yang baru saja diselamatkan dari perbudakan, kemudian membantu membayar pekerja sosial di tempat penampungan dan berkontribusi terhadap biaya pengadilan terkait upaya mengajukan kasus-kasus dan pengejaran pelaku praktik perbudakan.<sup>120</sup>

Pada tahun 2016, pemasukan yang diterima oleh *Anti Slavery* mencapai £ 1.967.759. Kemudian pada tahun tersebut, jumlah dana yang menjadi pengeluaran mencapai £ 2.314.193.<sup>121</sup> Memasuki tahun 2017 melalui semua sumber dananya, *Anti Slavery* berhasil mendapatkan pemasukan sejumlah £ 1.894.632 dan kemudian mencapai pengeluaran sebesar £ 2.060.720. Biaya tersebut, digunakan oleh *Anti Slavery* untuk dapat membayar pengadaan pelatihan pengelolaan bisnis kecil kepada korban perbudakan, mengadakan persediaan alat tulis dan buku sebagai fasilitas kelas pendidikan dasar.<sup>122</sup> Tahun 2018, *Anti Slavery* mendapatkan pemasukkan yang lebih besar apabila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sejumlah £ 2.956.517. Kemudian pengeluaran pada tahun 2018 juga mencapai jumlah yang lebih besar dari tahun sebelumnya, adapun pengeluarannya mencapai £ 2.933.982. Pengeluaran tersebut digunakan untuk pembiayaan implementasi program-program di Mauritania, untuk dapat megupayakan penghapusan praktik perbudakan.<sup>123</sup>

---

120 Anti Slavery, 2015, “*Annual Review 2014-2015*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2014-15.pdf> (accessed 2020, February 25).

121 Anti Slavery, 2016, “*Annual Review 2016*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2016.pdf> (accessed 2020, February 25).

122 Anti Slavery, 2017, “*Annual Review 2017*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2018/03/Annual-review-2017.pdf> (accessed 2020, February 25).

123 Anti Slavery, 2018, “*Annual Review 2018*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2018/11/Annual-Review-2017-18.pdf> (accessed 2020, February 25).

## BAB V

### PERAN ANTI SLAVERY DALAM USAHA MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN DI MAURITANIA TAHUN 2013 – 2018

#### 5.1 Peran *Anti Slavery* sebagai *Implementers*

*Anti Slavery* sebagai INGO yang memiliki cita-cita untuk menghapuskan praktik perbudakan di seluruh dunia, berupaya untuk dapat menyediakan dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban praktik perbudakan. Di Mauritania, *Anti Slavery* membantu para korban perbudakan untuk melarikan diri dengan kemudian menyediakan fasilitas *shelter*<sup>124</sup> sebagai upaya untuk menjamin tempat tinggal para korban setelah melarikan diri dari tuan-tuan mereka.

Kemudian, *Anti Slavery* juga berupaya dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dan orang dewasa. Pendidikan menjadi hal yang penting untuk memutus siklus perbudakan selama beberapa generasi di Mauritania, kemudian mengingat sulitnya akses terhadap pendidikan yang dialami oleh *etnis Haratine*. Hingga tahun 2018 terhitung lebih dari 307 orang dewasa dan anak-anak berhasil mengikuti kelas dasar selama enam bulan, namun tetap berhasil mencapai standar setara dengan dua tahun pendidikan dasar negara.<sup>125</sup>

Kemudian terdapat program *Micro Financing* yang secara khusus diadakan di wilayah pedesaan Mauritania yaitu Atar, Bassiknou dan Nema semenjak tahun 2016.

*Anti Slavery* bersama mitranya *Sos-Esclaves* memberikan pengawasan

---

124 Anti Slavery, “*Mauritania : Descent Based Slavery*”, <https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/> (accessed 2020, February 25).

125 Anti Slavery, “*The Difference You Made in 2018*”, <https://www.antislavery.org/impact/difference-you-made-2018/> (accessed 2020, February 25).



sekaligus pendampingan terhadap 180 keturunan budak perempuan serta 145 korban praktik perbudakan yang tinggal di daerah pedesaan, dan menghadapi kesulitan ekonomi sosial, dengan memberikan bantuan keuangan dalam bentuk hibah serta bantuan ekonomi dan rehabilitasi sosial.<sup>126</sup>

Selanjutnya terdapat program ‘*Bouamatou*’ yang secara khusus diimplementasikan di wilayah pedesaan Aleg, Nema, dan Rosso semenjak tahun 2017. Hingga akhir tahun 2018 sekitar 15 korban praktik perbudakan telah diberikan dan menerima hibah untuk dapat mendirikan kios-kios komersial di depan rumah mereka. Kios-kios komersial tersebut digunakan untuk menjual garam, permen, rokok tunggal dan barang lainnya. Melalui program ini, para korban perbudakan wanita akhirnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang memberi mereka otonomi keuangan dan berperan sebagai kontributor bagi lingkungan sosial, di mana sebelumnya mereka secara tradisional hanya dipandang sebagai objek yang tunduk pada kehendak dari tuan mereka.<sup>127</sup>

Terlepas dari memberikan dukungan sosial ekonomi, *Anti Slavery* juga menyediakan bantuan psikologis kepada para korban. Bantuan ini diimplementasikan melalui kolaborasi bersama dengan konsultan psikiater sebagai upaya untuk mengevaluasi kebutuhan psikologis korban dari praktik perbudakan dan mengembangkan skema dukungan bersama untuk staf yang bekerja dengan para korban. Pengadaan fasilitas ini diharapkan agar korban praktik perbudakan

---

<sup>126</sup> Anti Slavery, 2019, “*Socio Economic Report*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/Socio-economic-report-Mauritania-english.pdf> (accessed 2020, February 25).

<sup>127</sup> *Ibid.*

secara mental dan psikologis mampu menjalani kehidupannya secara bebas, mandiri dan tidak kembali terjebak dalam praktik perbudakan.<sup>128</sup>

Selain menyediakan fasilitas *shelter*, pendidikan dan bantuan psikologis, *Anti Slavery* juga mengadakan fasilitas berupa bantuan hukum kepada para korban perbudakan. Bantuan hukum yang disediakan oleh *Anti Slavery* adalah merupakan upaya agar para korban perbudakan dapat melakukan penuntutan kepada mantan majikan dengan cara membawa kasus mereka tersebut ke pengadilan, hingga berhasil mendapatkan kompensasi sebagai bentuk keadilan. Dominasi yang dilakukan oleh etnis *White Moors* di ranah elit membuat sulitnya penerapan keadilan kepada etnis lainnya terutama terhadap etnis *Haratine* yang merupakan korban dari perbudakan itu sendiri. Maka dari itu, penyediaan fasilitas terkait bantuan hukum yang diadakan oleh *Anti Slavery* menjadi penting bagi korban perbudakan di Mauritania agar dapat melepaskan diri dari mantan tuan mereka. Hingga akhir tahun 2018 terdapat 40 kasus yang dibawa dan diajukan ke pengadilan, namun hanya terdapat 2 tuntutan yang dapat dikatakan sukses dan selesai.<sup>129</sup>

Bantuan hukum yang pertama berhasil dilakukan oleh *Anti Slavery*, merupakan bantuan yang diberikan kepada Fatimetou Mint Hamdi dan Fatimetou Mint Zaydih pada tahun 2016.<sup>130</sup> Kemudian kasus yang diajukan semenjak tahun

---

<sup>128</sup> Anti Slavery, 2019, "*The difficult Path to Freedom*", <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/AntiSlavery-Report-english.pdf> (accessed 2020, February 25).

<sup>129</sup> Anti Slavery, 2018, "*Annual Review 2017-2018*", <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2018/11/Annual-Review-2017-18.pdf> (accessed 2020, February 25).

<sup>130</sup> Anti Slavery, 2016, "*Double Court Victory Potential Game Changer Slavery Mauritania*", <https://www.antislavery.org/double-court-victory-potential-game-changer-slavery-mauritania/> (accessed 2020, February 20).

2011 lalu namun baru dapat ditindaklanjuti pada tahun 2018, korban dari praktik perbudakan yang bernama Said dan Yarg akhirnya berhasil menuntut mantan majikannya atas praktik perbudakan yang dilakukannya walaupun hukuman yang ditetapkan terbilang sangat ringan.<sup>131</sup>

## **5.2 Peran *Anti Slavery* sebagai *Catalyst***

Telah diperlakukan sebagai properti semenjak kecil, orang-orang yang berada dalam perbudakan tidak menerima pendidikan atau sumber daya keuangan dan biasanya tidak memiliki keterampilan salah satunya seperti kemampuan untuk menghitung uang, yang memungkinkan mereka sulit untuk bertahan hidup di luar praktik perbudakan. Hal ini membuat para korban dari praktik perbudakan sangat sulit untuk melarikan diri dari perbudakan dan mencari pekerjaan di luar, itulah sebabnya sangat penting untuk memberi mereka akses kepada kegiatan ekonomi yang dapat membantu mereka hidup mandiri dari mantan tuannya, tanpa membuat mereka terancam eksploitasi.<sup>132</sup> Mengingat banyaknya mantan budak wanita yang setelah keluar dari jebakan praktik perbudakan, masuk dan terjebak ke dalam praktik prostitusi atau hingga kelaparan karena tidak jaminan makanan serta tempat tinggal yang mereka dapatkan setelah terlepas dari tuannya.

Dalam upayanya menciptakan perubahan secara nyata bagi korban praktik perbudakan, *Anti Slavery* mengadakan kampanye sekaligus pelatihan kejuruan seperti katering, menjahit, pewarnaan kerudung dan tata rambut, hal ini dilakukan

---

131 Anti Slavery, 2018, “*Big Win in Mauritania*”, <https://www.antislavery.org/big-win-mauritania-slavery/> (accessed 2020, February 25).

132Anti Slavery, 2019, “*Lessons learned from socio-economic interventions in Mauritania*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/Socio-economic-report-Mauritania-english.pdf> (accessed 2020, February 25).

dengan harapan agar para korban perbudakan memiliki keahlian yang dapat menunjang kehidupan mereka. Pelatihan kejuruan tata rambut dan menjahit berlangsung setidaknya 12 bulan untuk membekali para korban praktik perbudakan dengan keterampilan yang cukup. Kemudian pelatihan pewarnaan kerudung dilakukan selama 6 bulan, dan telah mencakup pelatihan cara memotong kerudung. Selanjutnya pelatihan memasak atau catering yang diadakan selama satu tahun, dengan mengajarkan teknik menyiapkan jus, memanggang hingga persiapan untuk upacara dan perayaan tertentu.<sup>133</sup>

Melalui kampanye “*From Slavery Survivors to Entrepreneurs*”, di harapkan menjadi solusi atau jawaban bagi para korban praktik perbudakan yang ingin dan berani keluar dari perbudakan untuk kemudian memulai serta menjalankan kehidupan yang bebas dan memulai bisnisnya secara mandiri.<sup>134</sup>

Hingga akhir tahun 2018, terdapat 368 orang yang telah berhasil mengikuti pelatihan kejuruan serta menerima peralatan serta dana hibah masing-masing berjumlah US \$ 134 untuk menjalankan koperasi lokal yang kemudian dapat membantu korban praktik perbudakan mengembangkan usaha sendiri.<sup>135</sup> Hingga akhir tahun 2018 terdapat 180 wanita korban praktik perbudakan di Mauritania yang berhasil mengembangkan usaha mereka menjadi toko makanan dan toko

---

<sup>133</sup> Anti Slavery, 2019, “*Socio Economic Report*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/Socio-economic-report-Mauritania-english.pdf> (accessed 2020, February 25).

<sup>134</sup> Anti Slavery, 2018, “*The Different You Made in 2018*”, <https://www.antislavery.org/impact/difference-you-made-2018/> (accessed 2020, February 20).

<sup>135</sup> Anti Slavery, 2019, “*Socio-Economic report*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/Socio-economic-report-Mauritania-english.pdf> (accessed 2020, February 20).

pakaian serta beberapa kelompok telah mengembangkan strategi untuk meningkatkan penjualan mereka ke dalam bentuk stok produk yang tidak dimiliki pesaing mereka, seperti botol gas, es dan *couscous*.<sup>136</sup>

Memberikan fasilitas serta pelatihan melalui kampanye *From Slavery Survivor to Entrepreneur* kepada korban praktik perbudakan sehingga menghasilkan keterampilan, dapat menjadi sumber daya yang mereka miliki untuk kemudian memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk mengendalikan masa depan serta membawa kembali martabat mereka. Melalui kampanye dan pelatihan seperti ini dapat memungkinkan para korban praktik perbudakan untuk melihat maju ke masa depan dengan harapan dan optimisme.

Sekitar 80% korban perbudakan wanita yang telah terlibat dalam kampanye *From Slavery Survivors to Entrepreneur*, mengatakan bahwa telah berhasil meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan kemudian memberikan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga. Secara khusus, 45% dari mereka mengambil tindakan dengan memastikan setidaknya satu anak pergi ke sekolah.<sup>137</sup>

Salah satu korban dari praktik perbudakan yang berhasil mengikuti kampanye *From Slavery Survivors to Entrepreneur* dan membangun kembali kehidupannya adalah seorang perempuan bernama Tatinatt. Hingga saat ini, Tatinatt menetap di *shelter* yang merupakan fasilitas milik *Anti Slavery* dan membantu untuk menegaskan hal-hal terkait kebebasan serta ikut mendidik anak-

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

anak yang membutuhkan pendidikan. Menurutnya, seorang wanita terutama seorang budak tidak dapat bebas dan menghasilkan kekayaannya sendiri namun setelah kebebasan yang ia dapat serta bantuan dari pengadaan fasilitas yang ada membuatnya percaya bahwa ia benar-benar telah terbebas dari praktik perbudakan.<sup>138</sup>

### 5.3 Peran *Anti Slavery* sebagai *Partners*

Dalam usahanya menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania, *Anti Slavery* berperan sebagai *partner* atau mitra kerja sama dengan aktor-aktor lainnya yang dapat membantu pengembangan kapasitas dan penguatan kemampuan kinerjanya dalam mencapai tujuan utamanya. *Anti Slavery* telah melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah Mauritania untuk dapat mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui amandemen UU tahun 2007 yang dilakukan pada tahun 2015, organisasi yang telah terdaftar secara hukum selama paling tidak lima tahun dapat melakukan pelaporan terkait praktik perbudakan yang terjadi.<sup>139</sup>

Kemudian untuk mengupayakan penghapusan praktik perbudakan di Mauritania, *Anti Slavery* menjalin kemitraan bersama dengan *Sos-Esclaves* agar dapat mendekati dan menyentuh para korban praktik perbudakan di Mauritania. Dalam kemitraan yang dijalin bersama dengan *SOS-Esclaves*, *Anti-Slavery* telah melakukan banyak proyek dan telah di implementasikan seperti mengembangkan

---

138 Anti Slavery, "*The Difficult Path to Freedom*", <https://www.antislavery.org/difficult-path-to-freedom/> (accessed 2020, February 25).

139 Bureau of International Labour Affairs, 2015, "*Mauritania Moderate Advancement*", <https://www.justice.gov/eoir/page/file/905922/download> (accessed 2020, March 1).

penelitian, kampanye peningkatan kesadaran terkait praktik perbudakan, advokasi di tingkat nasional dan tingkat internasional, serta memberikan bantuan langsung kepada korban praktik perbudakan.

*Sos-Esclaves* merupakan mitra utama dalam banyak program dan proyek yang dijalankan oleh *Anti Slavery* di Mauritania untuk mengupayakan penghapusan praktik perbudakan. *Sos-Esclaves* menjadi jembatan antara *Anti Slavery* dengan para korban praktik perbudakan di Mauritania. Sebagai mitra, *Sos-Esclaves* memiliki tanggung jawab untuk dapat membantu korban perbudakan meninggalkan praktik tersebut. Melalui hubungan sebagai mitra, *Anti Slavery* membantu melatih hingga mengoordinasikan anggota *Sos-Esclaves* untuk dapat mengantisipasi dan mengidentifikasi praktik perbudakan. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan terkait keterampilan media, hak asasi manusia, identifikasi perbudakan, proses peradilan dasar, serta cara terbaik untuk menemani para korban ke pengadilan.<sup>140</sup>

Melalui pemberian pelatihan dan koordinasi tersebut, *Anti Slavery* mengupayakan peningkatan kapasitas anggota *Sos-Esclaves* dalam mengidentifikasi dan mendukung korban perbudakan sehingga menghasilkan *output* yang mengarah pada peningkatan jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan.<sup>141</sup> Dengan diadakannya pelatihan dan koordinasi yang dilakukan oleh *Anti Slavery* kepada anggota *Sos-Esclaves*, hingga akhir tahun 2014 terdapat sejumlah 23 korban perbudakan yang telah berhasil meninggalkan tuan mereka

---

<sup>140</sup> Anti Slavery, “*Annual Review 2017*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2018/03/Annual-review-2017.pdf> (accessed 2020, February 25).

<sup>141</sup> Anti Slavery, “*Annual Review 2014*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2014.pdf> (accessed 2020, February 25).

serta 15 di antaranya telah mengajukan kasusnya kepada polisi hingga pengadilan.<sup>142</sup>

Selain memberikan pelatihan kepada anggota *Sos-Esclaves, Anti Slavery* juga menjalin kerja sama dengan wartawan lokal di Mauritania melalui pengadaan pelatihan terkait pemahaman praktik perbudakan yang terjadi. Dengan mengadakan pelatihan tersebut, *Anti Slavery* bertujuan agar wartawan lokal dapat membawa cerita tentang praktik perbudakan di Mauritania kepada masyarakat luas.<sup>143</sup>

*Anti Slavery* juga membentuk kemitraan kolaboratif dengan *Minority Rights Group* (MRG) untuk dapat memperkuat bantuan hukum yang tersedia bagi korban praktik perbudakan. MRG merupakan organisasi HAM internasional terkemuka yang bekerja untuk mengamankan hak-hak etnis minoritas, agama dan bahasa serta masyarakat adat.<sup>144</sup> Selain itu, MRG dan *Anti Slavery* juga bersama berupaya untuk mendorong penerapan undang-undang perbudakan di Mauritania. Bersama MRG, *Anti Slavery* juga mendorong komitmen secara nyata dari pemerintah Mauritania untuk menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania.<sup>145</sup>

Pada tahun 2011 *Anti Slavery* dan *Sos-Esclaves* membantu dua saudara korban praktik perbudakan bernama Said Ould Salem dan saudaranya Yarg, melarikan diri dari tuannya. Mereka dilahirkan sebagai budak salah satu keluarga

---

142 Anti Slavery, “*Annual Review 2014-2015*”, <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2014-15.pdf> (accessed 2020, February 25).

<sup>143</sup> *Ibid.*

144 Minority Right Group, “*About Us*”, <https://minorityrights.org/about-us/> (accessed 2020, February 20).

145 Anti Slavery, 2015, “*New Mauritanian anti-slavery law is worthless if not implemented*”, <https://www.antislavery.org/new-mauritanian-anti-slavery-law-worthless-not-implemented/> (accessed 2020, February 20).



kaya di Mauritania, setelah mewarisi status budak dari ibu mereka. Mereka bekerja sepanjang hari sejak usia sangat dini sementara anak-anak tuan mereka pergi ke sekolah dan bermain sepak bola, tidak diizinkan makan makanan yang sama dengan anggota keluarga lainnya, atau tidur di kamar yang sama, atau mengenakan pakaian yang sama.<sup>146</sup>

Kemudian, *Anti Slavery* bersama mitranya *Sos-Esclaves* telah melaporkan kasus yang dialami oleh Said dan Yarg ke pengadilan di Mauritania. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak juga membuahkan hasil setelah akhirnya menunggu lima tahun kemudian. Melalui kerja sama yang dilakukan oleh *Anti Slavery* dan MRG, kasus mereka berhasil dibawa oleh MRG ke pengadilan Uni Afrika pada tahun 2016. *Anti Slavery* dan MRG mendorong tanggapan dari pihak berwenang Mauritania dan mengorganisir sidang banding pada bulan November 2016 sehingga dapat meningkatkan tingkat kompensasi yang diberikan kepada kedua korban praktik perbudakan tersebut.<sup>147</sup>

Upaya yang dilakukan oleh *Anti Slavery* dan MRG akhirnya menghasilkan penetapan hukuman kepada mantan tuan mereka yang mengharuskannya untuk menerima hukuman selama dua tahun penahanan, walaupun seharusnya hukuman atas tindakan perbudakan setidaknya diberikan selama 5 sampai 10 tahun penahanan. Kini, Said dan Yarg keduanya telah mendapatkan akses pendidikan di

---

<sup>146</sup> Anti Slavery, “*Said and Yarg*”, <https://www.antislavery.org/impact/stories/said-yarg/> (accessed 2020, February 25).

<sup>147</sup> *Ibid.*

sekolah menengah dan masing-masing bermimpi menjadi pembela hak asasi manusia dan pengacara.<sup>148</sup>

*“Kami sudah lama menunggu, dan kini hidup kami sangat berbeda. Kami bangga karena kami bebas. Kami merasa seperti kami adalah manusia sekarang.”*<sup>149</sup>

Dalam ranah internasional, *Anti Slavery* memiliki hubungan afiliasi dalam status konsultatif bersama dengan *United Nations Economic and Social Council*. Terdapat tiga jenis status konsultatif yaitu umum, khusus dan *roster* (anggota), yang mana *Anti Slavery* termasuk dalam jenis status konsultatif khusus. Dalam resolusi ECOSOC 1996/31, NGO yang berada dalam status konsultatif umum dan khusus memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan singkat kegiatan yang telah dilaksanakan setiap 4 tahun atau yang dikenal sebagai laporan kuadrannial. Laporan tersebut harus mencakup informasi tentang kontribusi yang dilakukan oleh *Anti Slavery* dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah dirancang oleh *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) dan PBB pada umumnya berdasarkan bidang pengalaman dan keahlian yang relevan.<sup>150</sup>

Melalui hubungan afiliasi ini, *Anti Slavery* diberikan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam berbagai acara, pertemuan, dan kegiatan yang disponsori oleh PBB. Dengan demikian, tinjauan empat tahunan menyajikan kesempatan bagi *Anti*

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> United Nations Economic and Social Council, “*How to apply for Consultative Status with Ecosoc?*”, <https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html> (accessed 2020, February 20).

*Slavery* untuk menerima umpan balik dari negara-negara anggota mengenai program kerja mereka serta pengakuan resmi atas kontribusi mereka sebagai mitra dalam pengembangan terkait praktik perbudakan terutama di Mauritania. Selain itu, melalui afiliasi ini *Anti Slavery* berhak memberikan rekomendasi untuk program kerja serta proposal baru selama dua kali dalam satu tahun.<sup>151</sup>

Kemudian, *Anti Slavery* juga menjalin afiliasi dengan status partisipatif bersama dengan *Council of Europe*. Melalui afiliasi ini, *Anti Slavery* bekerja sama dengan *Council of Europe* dalam konteks untuk melakukan aksi menentang perdagangan manusia dan aktif dalam upaya melobi penandatanganan serta ratifikasi.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Council of Europe, “*Implementation of Committee of Ministers Resolution on participatory status for international non-governmental organisations with the Council of Europe*”, <https://rm.coe.int/09000016805d2e4c> (accessed 2020, February 25).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Perbudakan yang terjadi di Mauritania, merupakan hal yang sangat kompleks untuk diuraikan penyebab dan alasannya. Banyaknya faktor yang semakin melanggengkan pelanggaran tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah negara itu sendiri. Rendahnya peran pemerintah dalam upaya penghapusan praktik perbudakan akhirnya membuat Mauritania ditetapkan sebagai negara nomor 1 tertinggi dengan masyarakat yang terjebak dalam praktik perbudakan pada tahun 2013. Tidak berhenti disitu, walaupun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun tetap saja dalam pengimplementasiannya dan fakta di lapangan menyatakan hal yang berbeda.

Tindakan kekerasan dan pelecehan yang sering kali menyertai orang-orang yang berada dalam praktik perbudakan, menjadi salah satu hal yang fatal dalam praktik perbudakan di Mauritania. Hal tersebut akhirnya menghasilkan rasa ketakutan tersendiri yang dialami oleh banyak korban praktik perbudakan, sehingga membuat mereka menolak untuk pergi dari tuannya. Kemudian, adanya kenyataan yang akan membuat mereka kehilangan tempat tinggal, makanan dan keluarga juga menjadi salah satu alasan para korban praktik perbudakan sulit melakukan upaya pelarian dari tuan mereka. Tingginya kerentanan ekstrim seperti buta huruf, trauma psikologis, masalah kesehatan, stigmatisasi sosial, tanggungan serta kebutuhan yang harus dipenuhi, tindakan balas dendam oleh mantan tuannya, juga menjadi

sebuah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih untuk melakukan pelarian.

Sebagai INGO yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menghapuskan praktik perbudakan di seluruh dunia, membuat *Anti Slavery* kemudian bergerak melakukan usaha untuk menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania. Semenjak tahun 2013 hingga 2018, *Anti Slavery* telah mengadakan serta memberikan bantuan dan fasilitas di berbagai bidang seperti sosial, hukum, ekonomi dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan terkait praktik perbudakan yang terjadi dan peran *anti slavery* dalam usaha menghapuskan perbudakan di mauritania tahun 2013 – 2018, penulis menarik kesimpulan bahwa *Anti Slavery* telah berperan dalam usaha menghapuskan praktik perbudakan di Mauritania melalui perannya sebagai *implementer, catalyst* dan *partner*.

*Anti Slavery* telah berperan sebagai *service delivery* atau *implementer* dengan menyediakan bantuan terhadap pemberian akses pendidikan untuk menuntaskan permasalahan buta huruf yang dialami oleh kebanyakan korban praktik perbudakan di Mauritania. Kemudian *Anti Slavery* juga telah menyediakan fasilitas berupa *shelter* atau tempat tinggal yang dapat menampung para korban praktik perbudakan yang belum memiliki tempat tinggal setelah melakukan pelarian dari tuannya. *Anti Slavery* juga telah memberikan dana hibah melalui program *Bouamatou* yang dapat membantu para korban praktik perbudakan di sekitar perdesaan mendirikan usaha mikro sebagai upaya agar para korban praktik

perbudakan menjadi lebih mandiri. Kemudian terdapat penyediaan jasa bantuan pendamping hukum serta bantuan psikologis bagi para korban praktik perbudakan.

Sebagai upayanya membawa perubahan yang nyata bagi para korban praktik perbudakan, *Anti Slavery* telah berhasil mengadakan kampanye tentang kegiatan berwirausaha bagi para perempuan korban praktik perbudakan. Melalui kampanye *From Slavery Survivors to Entrepreneur* dan diiringi dengan pelatihan kejuruan yang disediakan, membuat *Anti Slavery* berhasil menginspirasi para korban praktik perbudakan untuk menjadi seorang pengusaha. Melalui ini pula, *Anti Slavery* telah membantu para korban praktik perbudakan untuk dapat secara mandiri siap melanjutkan kehidupan mereka tanpa ketergantungan kepada mantan tuan mereka.

Sebagai *partner*, *Anti Slavery* telah menjalin hubungan kemitraan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Bersama dengan mitra lingkup nasionalnya yaitu *Sos-Esclaves* dan *Minority Rights Group*, *Anti Slavery* telah berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai INGO yang memiliki fokus dalam praktik perbudakan hingga berhasil mencapai tujuannya menjangkau serta merangkul orang-orang yang terjebak dalam perbudakan di Mauritania dan kemudian melakukan kegiatan seperti advokasi untuk membantu para korban perbudakan mengklaim hak-haknya. Kemudian melalui afiliasi yang dijalin dalam ranah internasional, *Anti Slavery* telah secara aktif membawa isu perbudakan agar terus menjadi prioritas hingga tujuan utama untuk menghapuskan praktik perbudakan tercapai.

Kemudian melalui hubungan mitra bersama dengan pemerintah Mauritania, secara langsung telah memperkuat kapabilitas *Anti Slavery* untuk mengupayakan penghapusan praktik perbudakan melalui pelaporan terkait praktik perbudakan yang terjadi. Terlepas dari hubungan mitra yang telah berhasil dibangun dengan mitra akar rumput dan pemerintah, terdapat hal yang vital namun belum tersentuh oleh *Anti Slavery*. Salah satu penyebab langgengnya praktik perbudakan di Mauritania adalah pemahaman dogma agama yang salah, kemudian kepercayaan itu telah bertahan lama di kehidupan masyarakat. Akan tetapi, *Anti Slavery* belum melakukan upaya untuk menghilangkan pemahaman tersebut namun lebih condong megarah kepada upaya penyediaan bantuan dan jasa dalam bidang ekonomi dan sosial.

## **6.2 Saran**

Bagi penulis yang ingin membahas terkait isu perbudakan, perlu terlebih dahulu memahami bentuk-bentuk perbudakan baik *old slavery*, *modern slavery* maupun *old slavery* yang berada di tengah-tengah dunia modern. Kemudian, apabila penulis ingin mengkaji peran dari sebuah organisasi internasional ada baiknya untuk melihat publikasi data terlebih dahulu karena data yang dilampirkan terkadang tidak memuat segala proses yang ada sehingga penulis perlu mencari data yang tersebar dalam beberapa dokumen satu per satu.

## Daftar Pustaka

Sumber *Offline* :

- Bakry, Umar S. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: University Press, 1999.
- Bales, Kevin and Nazneen Kanji. *Disposable People : New Slavery in The Global Economic*. Berkley: University of California, 2012
- Hass, Michael and N James Rossenau. *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, 1969.
- International Labour Organization. *Appointment of a Special Rapporteur on contemporary forms of slavery*. 2007.
- K, Robert Christensen. *International Nongovernmental Organizations: Globalization, Policy Learning, and the Nation-State*. London: Routledge, 2006.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada, 2006.
- Mathewson, Sarah and Rebecca Marlin. *Enforcing Mauritania's Anti Slavery Legislation : The Continued Failure of the Justice System to Prevent, Protect and Punis*. Inggris: The British Library, 2015.
- McDougall, Anne E. *Living The Legacy of Slavery*. Canada: University of Alberta, 2005.
- Muslich, Mansur. *Melaksanakan PTK Itu Mudah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Shannon, Garcia and Aaron Baxtor. *A ROADMAP TO WHERE? The Haratin and the Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery*. Portland: Lewis and Clark Law School, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Kartasura: Fairus Media, 2008.



Sujana, Nana and Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

United Nations. "Slavery Convention." 1995.

White, Shelley K and Jonathan M White. *Sociologist in Action on Inequalities : Race, Class, Gender and Sexuality*. New York: Sage, 2014.

Sumber Online :

Abbott, K and Snidal, D. *Why States Act through Formal International Organizations*. 1998.

<<https://sta.uwi.edu/iir/normangirvanlibrary/sites/default/files/normangirvanlibrary/documents/Why%20States%20Act%20Through%20Formal%20International%20Organisations.pdf>>.

*African Charter On The Rights And Welfare Of The Child*. <[https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr\\_charter\\_rights\\_welfare\\_child\\_africa\\_1990.pdf](https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf)>.

*African Charter On Human And Peoples Rights*. <<http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf>>.

Anti Slavery. *Let's Give Woman Tools to Live Their Lives in Freedom*. <<https://www.antislavery.org/lets-give-women-tools-to-live-their-lives-in-freedom/>>.

Anti Slavery. *A Difficult Path to Freedom*. <<https://www.antislavery.org/difficult-path-to-freedom/>>.

Anti Slavery. *About Us*. <<https://www.antislavery.org/about-us/>>.

Anti Slavery. *Annual Review*. 2013. <<https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Review-2013-small.pdf>>.

Anti Slavery. *Big Win in Mauritania*. 2018. <<https://www.antislavery.org/big-win-mauritania-slavery/>>.

Anti Slavery. *Double Court Victory Potential Game Changer Slavery Mauritania*. 2016. <<https://www.antislavery.org/double-court-victory-potential-game-changer-slavery-mauritania/>>.

Anti Slavery. *Government Response Rating : Africa*. 2018. <<https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/africa/>>.

Anti Slavery. *Help Us Finished What We Started*. <<https://www.antislavery.org/abolition/>>.

Anti Slavery. *How We Work to End Slavery*. <<https://www.antislavery.org/what-we-do/how-we-work/>>.

Anti Slavery. *Slavery Today*. <<https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>>.

Anti Slavery. *Joint submission for the Universal Periodic Review of Mauritania*". <[https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/1\\_upr\\_submission\\_on\\_mauritania\\_2015.pdf](https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/1_upr_submission_on_mauritania_2015.pdf)>.

Anti Slavery. *Lessons learned from socio-economic interventions in Mauritania*. 2019. <<https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/Socio-economic-report-Mauritania-english.pdf>>.

Anti Slavery. *Mauritania : Descent Based Slavery*. <<https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/>>.

Anti Slavery. *Moulkheir, Mauritania*. <<https://www.antislavery.org/impact/stories/moulkheir/>>.

Anti Slavery. *New Mauritanian anti-slavery law is worthless if not implemented*. 2015. <<https://www.antislavery.org/new-mauritanian-anti-slavery-law-worthless-not-implemented/>>.

Anti Slavery. *Our History*. <<https://www.antislavery.org/about-us/history/>>.

Anti Slavery. *Partners*. <<https://www.antislavery.org/about-us/partners/>>.

- Anti Slavery. *Said and Yarg, Mauritania*.  
<<https://www.antislavery.org/impact/stories/said-yarg/>>.
- Anti Slavery. *Socio Economic Report*. 2019. <<https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/09/Socio-economic-report-Mauritania-english.pdf>>.
- Anti Slavery. *Staff and Trustees*. <<https://www.antislavery.org/about-us/staff/>>.
- Anti Slavery. *Take Action Become a Member*. <<https://www.antislavery.org/take-action/become-a-member/>>.
- Anti Slavery. *The Difference You Make in 2018*.  
<<https://www.antislavery.org/impact/difference-you-made-2018/>>.
- Anti Slavery. *The Different You Made in 2018*.  
<<https://www.antislavery.org/impact/difference-you-made-2018/>>.
- Anti Slavery. *UN Confirms Slavery in Mauritania*. 2009.  
<<https://www.antislavery.org/un-confirms-slavery-mauritania/>>.
- Anti Slavery. *What We Do : Mauritania*. <<https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/>>.
- BBC. *Mauritania Country Profile*. 2018. <<https://www.bbc.com/news/world-africa-13881985>>.
- BBC. *Mauritania MPs Pass Slavery Law*. 2007.  
<<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm>>.
- Bureau of International Labour Affairs. *Mauritania Moderate Advancement*. 2015.  
<<https://www.justice.gov/eoir/page/file/905922/download>>.
- Central Intelligence Agency. *The World Factbook : Mauritanian Ethnic Group*.  
<<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html>>.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.  
<<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>>.

*Convention on the Rights of the Child.*

<<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>>.

Council of Europe. *Implementation of Committee of Ministers Resolution on participatory status for international non-governmental organisations with the Council of Europe.* <<https://rm.coe.int/09000016805d2e4c>>.

Diagana, Kissima. *Mauritania Jails 13 Anti-Slavery Activists.* 2016.

<<https://www.aljazeera.com/news/2016/08/mauritania-jails-13-anti-slavery-activists-160819132028879.html>>.

Global Slavery Index. *Regional Analysis : Africa, 2018.*

<<https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/africa/>>.

Global Slavery Index. *Country Data : Mauritania.* .

<<https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/mauritania/>>.

Global Slavery Index. *The Global Slavery Index Highlights 2013 : Mauritania.*

<[http://www.freedom.firm.in/wp-content/uploads/2014/04/GlobalSlaveryIndex\\_2013\\_Download\\_WEB1.pdf](http://www.freedom.firm.in/wp-content/uploads/2014/04/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf)>.

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.*

<[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-2&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en)>.

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*

<[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-3&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en)>.

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.*

<<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>>.

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*

<<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>>.

McAllister, Edward. *Mauritania Jails Anti-Slavery Activists For Up To 15 Years.*

(2016). <<https://www.reuters.com/article/us-mauritania-politics/mauritania-jails-anti-slavery-activists-for-up-to-15-years-idUSKCN10U19O>>.

Minority Right Groups. *About Us.* <<https://minorityrights.org/about-us/>>.

Nossiter, Adam. *Mauritania Confronts Long Legacy of Slavery.* 2013.

<<https://www.nytimes.com/2013/11/12/world/africa/mauritania-confronts-long-legacy-of-slavery.html>>.

*Protocol To The African Charter On Human Andpeoples' Rights On The Rights Of Women In Africa.*

<[https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol\\_rights\\_women\\_africa\\_2003.pdf](https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf)>.

Shahinian, Gulnara. *Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences.*

<[https://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2\\_en.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2_en.pdf)>.

Sutter, D John. *Mauritanian Refugees Make a New Home in Ohio.* 2012.

<<https://www.cnn.com/2012/03/17/us/mauritanian-refugees-ohio/index.html>>.

The World Bank. *Mauritania : Total Population.*

<<https://data.worldbank.org/country/mauritania>>.

United Nations Treaty Collection. *Convention on the Rights of the Child.*

<[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-11&chapter=4&lang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en)>.

United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. *OHCHR in Mauritania*.

<<https://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/OHCHRMAuritania.aspx>>.

United Nations Economic and Social Council. *How to apply for Consultative Status with Ecosoc?*. <<https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html>>.

Unknown. *Création d'une Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage en Mauritanie*. 2013. <[http://www.cridem.org/C\\_Info.php?article=641097](http://www.cridem.org/C_Info.php?article=641097)>.